



**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ADI KARYA  
MANDIRI DI DESA SUMUR BATU KECAMATAN  
BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2016-2019**

Skripsi

Dibuat oleh :

Dias Nursifa  
022116175

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**AGUSTUS 2020**

## ABSTRAK

Dias Nursifa. 022116175. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Tahun 2016-2019. Pembimbing : Prof. Dr. H. Hari Gursida, CA., MM., CPA dan Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak. 2020.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Penyusunan laporan keuangan BUMDes harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Artinya dalam hal penyusunan Laporan keuangannya maka BUMDes harus mengacu pada pedoman umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau sering juga disebut dengan istilah SAK ETAP.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) memberikan pengetahuan penerapan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri Tahun 2016-2019. (2) untuk memberi penjelasan kendala-kendala dalam penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri. (3) untuk memberikan penyelesaian atau solusi terhadap kendala yang dihadapi BUMDes Adi Karya Mandiri.

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Adi Karya Mandiri Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan data kualitatif yang berhubungan dengan penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan diperoleh dengan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, catatan laporan bukti-bukti transaksi dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Adi Karya Mandiri menyajikan laporan keuangan hanya satu jenis yaitu laporan laba rugi saja. Sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (2) pengakuan dan pengukuran penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dengan benar. (3) kendala-kendala dalam menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan : a. rendahnya pemahaman pemilik terhadap SAK ETAP. b. belum adanya pendamping yang intensif terkait penerapan SAK ETAP. c. Kurangnya sosialisasi kepada BUMDes terkait Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. d. Terjadinya multitasking dalam pengerjaan tugas yang di alami oleh ketua BUMDes dalam hal administrasi dan keuangan. e. Kurangnya pengawasan dari pihak berkepentingan seperti pemerintah desa.

**Kata Kunci:** SAK ETAP, BUMDes, Laporan Keuangan

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ADI KARYA  
MANDIRI DI DESA SUMUR BATU KECAMATAN  
BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2016-2019**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arief'.

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ADI KARYA  
MANDIRI DI DESA SUMUR BATU KECAMATAN  
BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2016-2019**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari: Kamis Tanggal: 06 Agustus 2020

Dias Nursifa  
022116175

Menyetujui,  
**Ketua Sidang Penguji**



(Ketut Sunarta, Ak.,MM.,CA.,PIA)

Ketua Komisi Pembimbing



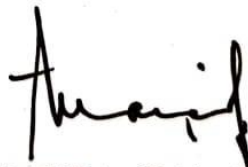
( Prof. Dr. H. Hari Gursida, CA., MM., CPA )

Anggota Komisi Pembimbing



(Agung Fajar Ilmiyono, SE.,MAk)

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**© Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun  
2020 Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tujuan penulisan proposal penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor” ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu dalam hal memberi masukan, semangat, serta dukungan dalam penyusunan proposal penelitian ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Asep Saepulloh dan Didah Siti Saadah yang telah banting tulang untuk dapat bisa menjadikan anaknya mendapatkan gelar S1 Akuntansi, dan selalu memberikan segala hal untuk saya, baik panjatan doa yang tak hentinya di panjatkan kepada Allah SWT, lalu selalu memberikan motivasi, hiburan, dukungan moril dan materil serta kasih sayang.
2. Kedua adik saya Alma Putri Adilah dan Arsyila Adia Shezan yang telah menjadi motivasi dan sumber semangat saya selama menjalankan proses pendidikan.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak.,MM.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, yang telah menjadi Dekan terbaik.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,CA.,CSEP.,QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, yang selalu menjadi inspirator untuk saya.
5. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, SE.,M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, yang telah menjadi Ibu kedua di kampus dengan kasih sayangnya dan ilmu yang telah diberikan, dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk hidup saya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Hari Gursida, MM., Drs. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan penelitian ini.
7. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan memberikan saran selama penulisan penelitian ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
9. Mohamad Seto Budiono yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
10. Teruntuk Team Adventure yaitu Karien Anandita, Faisal Aby Harahap, Fahrul Bariq selaku team pendukung saya setiap saat.

11. Kedua sahabat saya di kampus Rilia Gita Yostina dan Lusi Oktaviana yang menjadi sahabat debat tapi tetap sayang dan yang selalu memberikan doa dan semangat.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) FE-Unpak terutama angkatan 2016 yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tapi, terimakasih atas pengalaman serta dukungannya dan kekeluargaan yang telah terjalin selama perkuliahan.
13. Keluarga besar Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) FE-Unpak periode 2019-2020 yang selalu mensupport.
14. Teman-teman kelas E angkatan 2016 yang menemani dari awal semester terimakasih telah mempercayakan saya sebagai komti kelas dan makasih atas pengalaman di kelas selama ini yang menjadikan saya lebih dewasa.
15. Teman-teman satu bimbingan Bapak Hari dan Pak Agung yang sama-sama berjuang dan saling memberikan motivasi untuk mencapai gelar sarjana.
16. Seluruh angkatan 2016 akuntansi yang telah menjadi teman saya terutama teman seperjuangan untuk menggapai gelar S1 Akuntansi, yang telah hadir dalam hidup saya dan menjadikan masa perkuliahan saya lebih berwarna.
17. Seluruh keluarga Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan serta banyak pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dalam membuat proposal penelitian ini saya menyadari masih memiliki keterbatasan dan kekurangan baik dari bahan ataupun dari penulisan. Dengan ini, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Bogor, Agustus 2020

Dias Nursifa

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HAK CIPTA</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Maksud Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	6
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Laporan Keuangan.....	7
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	7
2.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan.....	8
2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).....	9
2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).....	9
2.2.2 Ruang Lingkup SAK ETAP.....	9
2.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP.....	10
2.2.4 Posisi Keuangan.....	12
2.2.5 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan.....	13
2.2.6 Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan.....	13
2.2.7 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP.....	14
2.2.8 Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP.....	16
2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	20
2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	20



2.3.2 Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	20
2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	21
2.4.1 Penelitian Sebelumnya .....	21
2.4.2 Kerangka Pemikiran .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	35
3.4 Operasionalisasi Variabel .....	36
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	38
4.1.1 Gambaran Umum Desa Sumur Batu .....	38
4.1.2 Sejarah dan Perkembangan Pengeolahan Pabrikasi Tong Sampah BUMDes Adi Karya Mandiri .....	38
4.1.3 Kegiatan Usaha.....	40
4.1.4 Struktur Organisasi.....	41
4.2 Pelaksanaan Penerapan SAK ETAP Laporan Keuangan pada BUMDes Adi Karya Mandiri .....	42
4.3 Analisis Laporan Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri dengan SAK ETAP .....	43
4.3.1 Pengakuan Akun Laporan Posisi Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri .....	43
4.3.1.1 Aset .....	43
4.3.1.2 Kewajiban .....	44
4.3.1.3 Ekuitas .....	44
4.3.2 Pengukuran Akun Laporan Posisi Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri .....	46
4.3.2.1 Aset .....	46
4.3.2.2 Kewajiban .....	47
4.3.2.3 Ekuitas .....	47
4.3.3 Pengakuan Akun Laporan Laba Rugi BUMDes Adi Karya Mandiri .....	48
4.3.3.1 Pendapatan .....	48
4.3.3.2 Biaya .....	48
4.3.4 Pengukuran Akun Laporan Laba Rugi BUMDes Adi Karya Mandiri .....	49
4.3.4.1 Pendapatan .....	49
4.3.4.2 Biaya .....	49
4.3.5 Laporan Perubahan Ekuitas.....	50
4.3.6 Laporan Arus Kas .....	51

4.3.7 Catatan Atas Laporan Keuangan .....	51
4.3.8 Kendala Yang dihadapi BUMDes Adi Karya Mandiri Dalam Penerapan SAK ETAP.....	51
4.3.9 Penyajian Laporan Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri .....	52
4.3.8.1 Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 .....	52
4.3.8.2 Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 .....	52
4.3.8.3 Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 .....	56
4.3.8.4 Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 .....	60
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	65
5.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kelengkapan Penyajian Laporan Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri berdasarkan SAK ETAP .....	3
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya.....	21
Tabel 3.1	Operasional Variabel Penelitian.....	36
Tabel 4.1	Perkiraan Arus Kas Unit Usaha Pabrikasi Tong Sampah BUMDes Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor .....	40
Tabel 4.2	Perbandingan Pengakuan Laporan Posisi Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri Dengan Ketentuan SAK ETAP .....	45
Tabel 4.3	Perbandingan Pengukuran Laporan Posisi Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri Dengan Ketentuan SAK ETAP .....	47
Tabel 4.4	Perbandingan Pengakuan Laporan Laba Rugi BUMDes Adi Karya Mandiri Dengan Ketentuan SAK ETAP .....	49
Tabel 4.5	Perbandingan Pengukuran Laporan Laba Rugi BUMDes Adi Karya Mandiri Dengan Ketentuan SAK ETAP.....	50
Tabel 4.6	Laporan Posisi Keuangan 2017.....	53
Tabel 4.7	Laporan Laba Rugi 2017 .....	53
Tabel 4.8	Laporan Sisa Hasil Usaha 2017.....	54
Tabel 4.9	Laporan Perubahan Modal 2017 .....	54
Tabel 4.10	Laporan Arus kas 2017 .....	55
Tabel 4.11	Catatan atas Laporan Keuangan 2017 .....	56
Tabel 4.12	Laporan Posisi Keuangan 2018.....	57
Tabel 4.13	Laporan Laba Rugi 2018 .....	57
Tabel 4.14	Laporan Hasil Sisa Usaha 2018.....	58
Tabel 4.15	Laporan Perubahan Ekuitas 2018.....	58
Tabel 4.16	Laporan Arus Kas 2018 .....	59
Tabel 4.17	Catatan atas Laporan Keuangan 2018 .....	59
Tabel 4.18	Laporan Posisi Keuangan 2019.....	60
Tabel 4.19	Laporan Laba Rugi 2019 .....	61
Tabel 4.20	Laporan Hasil Sisa Usaha 2019.....	62
Tabel 4.21	Laporan Perubahan Ekuitas 2019.....	62
Tabel 4.22	Laporan Arus Kas 2019 .....	62
Tabel 4.23	Catatan atas Laporan Keuangan 2019 .....	63

## **TABEL GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	34
-------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Laporan Kinerja
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Hasil wawancara

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia yang semakin maju ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, maka akuntansi berperan menjadi suatu sistem informasi keuangan untuk melaporkan keadaan keuangan di suatu perusahaan. Sebuah perusahaan harus mampu menyusun laporan keuangan yang bisa memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pemakai, baik dari pihak internal dan eksternal perusahaan. Melihat pentingnya laporan keuangan dalam menilai kesehatan perusahaan, maka laporan keuangan harus disusun secara cermat dan terbebas dari bias. Laporan keuangan harus dapat diinterpretasikan oleh para pihak yang memiliki kepentingan (*interested party*) dengan persepsi yang sama. Untuk itu perlu adanya suatu standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan suatu perusahaan (Kalangi, Sondakh, dan Pratiwi, 2014)

Akuntansi sendiri mempunyai standar dalam menyusun laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar dalam penyusunan laporan keuangan. Standar penyusunan laporan keuangan tersebut berupa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dengan adanya standar ini dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. SAK ETAP berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggungjawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP, dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Maka ditetapkannya standar tersebut diharapkan mampu menerapkan dan menyesuaikan apa yang telah diatur di dalamnya, sehingga tercapainya laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta terciptanya transparansi, akuntabilitas dan globalisasi bahasa laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun diharapkan dapat di audit dan mendapatkan opini audit, sehingga akses untuk mendapatkan pendanaan akan semakin luas.

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa BUMDes adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang bercirikan Desa dan dibentuk secara kolektif oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan, bahwa BUMDes dibentuk oleh pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (*vide* penjelasan Pasal 87 ayat 1 UU Desa). Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip akuntansi yang tepat pada BUMDes adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara tepat dan benar. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang memiliki identitas dan dasar hukum. Maka, penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangannya juga harus berpedoman pada standar keuangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki kepercayaan dari semua pihak.

Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan BUMDes harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Artinya dalam hal penyusunan Laporan keuangannya maka BUMDes harus mengacu pada pedoman umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau sering juga disebut dengan istilah SAK ETAP. Seperti ditulis oleh Ayu Resti di Artikel Standar Akuntansi yang Diterapkan BUMDes ([blog.bumdes.id](http://blog.bumdes.id) 2019) dalam penatausahaan keuangan, BUMDes menerapkan SAK ETAP sebagai standar yang paling pas untuk BUMDes. Dalam SAK ETAP penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ini artinya bahwa BUMDes harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP.

Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat. Menurut Ade Yasin sebagai Bupati Bogor dari 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor baru 276 desa yang memiliki BUMDes, dari jumlah tersebut baru 189 BUMDes yang aktif sementara lainnya masih belum aktif. Bahkan berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dari 189 BUMDes yang baru aktif baru 2 BUMDes yang berkategori maju, 22 BUMDes yang berkembang dan 165 Desa berkategori dasar. Keberadaan BUMDes tersebut penting karena pihaknya ingin membangun kabupaten ini dari desa yang tidak merusak alam, memaksimalkan potensi yang ada dan berkelanjutan ([kanaljabar.com](http://kanaljabar.com) 2019).

Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Bogor. Banyaknya pabrik dan usaha-usaha yang berada di sekitar daerah Desa Sumur Batu menjadi penunjang pada perekonomian desa. Perekonomian yang semakin tumbuh dengan pesatnya menjadikan pengaruh terhadap kemajuan kesejahteraan sosial dalam ekonomi masyarakat desa. Untuk mendorong kemajuan tersebut maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di

Desa Sumur Batu yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan, membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa, sebagai wadah yang menampung berbagai jenis usaha perekonomian di Desa, karena BUMDes harus menjadi tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi di desa.

BUMDes Adi Karya Mandiri bergerak pada bidang manufaktur, dimana produksi utamanya yaitu tong sampah. BUMDes tersebut sudah berdiri sejak tahun 2014. Walaupun telah terpilih menjadi lokasi pemberdayaan BUMDes, bukan berarti BUMDes Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu tidak menemui kendala, ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji didalam BUMDes Adi Karya Mandiri salah satunya laporan keuangan yang telah mereka susun apakah telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Ditulis Oleh Ersya Tri Wahyuni di Artikel dalam Majalah Akuntan Indonesia (etw-accountant.com 2018). Sejak UU No 6/2014 tentang Desa disahkan, desa-desa di Indonesia menjadi bergairah. Sejak tahun 2015, triliunan rupiah dikeluarkan sebagai dana desa. Tahun 2015 saja dana desa yang dialokasikan lebih dari 20 triliun untuk 74 ribu desa di Indonesia. Alokasi dana desa meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun yang ditunjukkan untuk 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota. Di tahun 2019 diperkirakan dana desa akan meningkat mencapai Rp 111 triliun rupiah. Aliran dana yang sangat besar dalam dua tahun terakhir ini tak pelak menimbulkan banyak masalah dalam pengelolaannya.

Berikut ini merupakan data kelengkapan penyajian laporan keuangan di BUMDes Adi Karya Mandiri berdasarkan penyajian laporan keuangan SAK ETAP dan data ini di dapatkan menggunakan metode wawancara dengan Ketua BUMDes.

Tabel 1.1  
Data Kelengkapan Penyajian Laporan Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri  
berdasarkan SAK ETAP

No.	SAK ETAP	BUMDes Adi Karya Mandiri
1.	Laporan Posisi Keuangan	Tidak Ada
2.	Laporan Laba Rugi	Ada
3.	Laporan Perubahan Ekuitas	Tidak Ada
4.	Laporan Aruskas	Tidak Ada
5.	Catatan atas Laporan Keuangan	Tidak Ada

Sumber : Wawancara penulis (2019)



Berdasarkan Tabel 1.1, BUMDes Adi Karya Mandiri dalam menyusun laporan keuangannya masih belum sesuai dengan SAK ETAP, biasanya pengurus BUMDes hanya memberi laporan perhitungan laba/rugi yang dihitung sendiri namun tidak menyajikan laporan keuangan dengan rinci atas segala pemasukan dan pengeluaran dalam periode berjalan sejak awal BUMDes berdiri. Sehingga dapat menimbulkan kecurigaan atas pengelolaan BUMDes tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan yang benar sesuai dengan standar laporan keuangan, BUMDes Adi Karya Mandiri kekurangan tenaga ahli dalam mengelola administrasi dan keuangan BUMDes. Sehingga terjadinya *multi-tasking* dalam pengerjaan tugas yang di alami oleh ketua BUMDes. Hal ini akan menimbulkan masalah ketika dana BUMDes yang dikelola dari kegiatannya dikelola apa adanya tanpa melalui proses pencatatan yang berdasarkan dengan SAK ETAP. Maka dibutuhkan bimbingan kepada pengurus BUMDes atas pengelolaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dari SAK ETAP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rudini, Nurhayati, Afriyanto (2015) dalam penelitiannya mengenai Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Di Desa Langkitin menghasilkan simpulan bahwa pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi yang dilakukan Penggolongan transaksi pada BUMDes Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Langkitin menggunakan jurnal memorial untuk peringkasan dan neraca percobaan untuk pengikhtisaran sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Langkitin menyajikan laporan keuangan hanya dalam dua jenis yaitu neraca dan laporan laba rugi sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian dari Jayanti, Masyhad, Qomari (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Surya Sejahtera” Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan atas berbagai transaksi yang dilakukan penggolongan transaksi pada BUMDesa “Surya Sejahtera” belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDesa “Surya Sejahtera” menyajikan laporan keuangan hanya tiga jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, dan kas sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BUMDes Adi Karya Mandiri dengan Judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Tahun 2016-2019”

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

BUMDes Adi Karya Mandiri dalam menyusun laporan keuangannya masih belum sesuai dengan SAK ETAP, biasanya pengurus BUMDes hanya memberi laporan perhitungan laba/rugi yang dihitung sendiri namun tidak menyajikan laporan keuangan dengan rinci atas segala pemasukan dan pengeluaran dalam periode berjalan sejak awal BUMDes berdiri. Maka hal ini akan menimbulkan masalah ketika dana BUMDes yang dikelola dari kegiatannya dikelola apa adanya tanpa melalui proses pencatatan yang berdasarkan dengan SAK ETAP. Identifikasi masalah ini penulis tertarik untuk menganalisis penerapan SAK ETAP laporan keuangan pada BUMDes Adi Karya Mandiri.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor 2016-2019?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi di dalam penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala-kendala di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Berdasarkan uraian pada perumusan masalah diatas, maka maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor 2016-2019.
2. Menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi di dalam penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
3. Menganalisis Bagaimana solusi untuk menyelesaikan kendala-kendala di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor?

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada perumusan masalah diatas, maka maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Tahun 2016-2019.
2. Dapat memberikan penjelasan mengenai kendala-kendala yang ada dalam penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
3. Dapat memberikan penyelesaian atau solusi terhadap kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Pada penyusunan skripsi, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan setelah terungkapnya hasil penelitian ini bagi banyak pihak, kegunaan yang diharapkan diantaranya sebagai berikut :

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengaplikasikan variabel penelitian ini untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada, agar dapat meningkatkan nilai usaha, serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu terutama di bidang akuntansi dan disiplin ilmu lainnya. Serta dapat dijadikan sumber atau referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya, yang akan mengembangkan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu penerapan SAK ETAP Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Seorang akuntan menghasilkan suatu informasi yang dituangkan dalam Laporan Keuangan (*Financial Statement*) yang mampu menggambarkan kondisi dan posisi keuangan serta hasil usaha suatu perusahaan yang berguna bagi para pemakai laporan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Hasil dari laporan keuangan dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan dikenal dengan istilah “*language of business*”

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2018:PSAK1) mengemukakan pengertian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Lubis (2017:137) menyatakan laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Hery (2018:3) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang ke dua adalah pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Menurut Harahap (2015:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Laporan posisi keuangan atau Laporan Laba/Rugi. Atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Sedangkan menurut Rahmaniari dan Soegijanto laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang bisa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, serta perlu dinilai dan diuji agar dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur sebagai media komunikasi data keuangan atau aktivitas perusahaan, sebagai pertanggungjawaban antara perusahaan (manajemen) dan para pemiliknya serta pihak lainnya.

### 2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

IAI (2018:ETAP3) menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut IAI dalam PSAK (2018:1.3) diketahui bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Hery (2018:3) bahwa tujuan laporan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan.
2. Memberi informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban.
5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.

Lubis (2017:13) secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Walaupun satu badan usaha dan karakteristik yang berbeda satu sama lainnya, secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan yang sama. Tujuan penyajian laporan keuangan oleh sebuah entitas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan.
4. Untuk memberikan informasi yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

## **2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

### **2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP disahkan oleh delapan belas orang anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 19 Mei 2009 di Jakarta. SAK ETAP terdiri atas 30 bab dan dilengkapi dengan daftar istilah di bagian akhir. SAK ETAP merupakan pilar kedua standar akuntansi keuangan di Indonesia setelah SAK umum berbasis IFRS. SAK ETAP mengatur pencatatan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi pada laporan keuangan. SAK ETAP berlaku efektif pada laporan keuangan dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan penerapan dini diperkenankan.

### **2.2.2 Ruang Lingkup SAK ETAP**

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

### 2.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018:ETAP 3-5), karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan :

#### 1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

#### 2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

#### 3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

#### 4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

#### 5. Substansi Mengguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan kendalan laporan keuangan.

#### 6. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

#### 7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

#### 8. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative. Maka, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

#### 9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengembalian keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

#### 10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya



tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

#### 2.2.4. Posisi Keuangan

Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

##### 1. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan di harapkan akan diperoleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan aset. Beberapa aset, misalnya aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Beberapa aset adalah tidak berwujud. Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik tidak esensial. Misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa adalah aset jika entitas mengendalikan manfaat yang diharapkan mengalir dari properti tersebut.

##### 2. Kewajiban

Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial dari kewajiban (*liability*) adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika:

- a. Oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu;
- b. Akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.

### 3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam Laporan Posisi Keuangan. Misalnya, entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, subklasifikasi dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas.

#### 2.2.5 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

1. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

#### 2.2.6 Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan

##### 1. Dasar Akrua

Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

##### 2. Pengakuan Dalam Laporan Keuangan

###### a. Aset

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

###### b. Kewajiban

Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

###### c. Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi

di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

d. **Beban**

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

e. **Laba atau Rugi**

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam laporan posisi keuangan yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan “*matching concept*”.

### **2.2.7 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP**

1. **Penyajian Wajar**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

2. **Kepatuhan terhadap SAK ETAP**

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

a. **Kewajiban**

Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

b. **Penghasilan**

Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan,

imbangan, bunga, deviden, royalti dan sewa. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

c. Beban

Beban mencakup kerugian dan beban yang ditimbulkan aktivitas entitas biasa. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

3. Kelangsungan Usaha

Saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

4. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan pelaporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- a. Fakta tersebut
- b. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek,
- c. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya dapat diperbandingkan.

5. Penyajian yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK ETAP bab 9 tentang kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan; atau
- b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- a. Sifat reklasifikasi;
- b. Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan
- c. Alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan :

- a. Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan
- b. Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

#### 6. Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

#### 7. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

### **2.2.8 Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP**

Laporan Keuangan Lengkap Laporan keuangan entitas menurut SAK ETAP meliputi:

#### 1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c. Persediaan;
- d. Properti investasi;
- e. Aset tetap;

- f. Aset tidak berwujud;
  - g. Utang usaha dan utang lainnya;
  - h. Aset dan kewajiban pajak;
  - i. Kewajiban diestimasi;
2. Laporan Laba Rugi;

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. pendapatan;
- b. Beban keuangan;
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- d. Beban pajak;
- e. Laba atau rugi neto.

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

### 3. Laporan Perubahan Ekuitas Dan Laporan Laba Rugi Dan Saldo Laba

#### 1) Laporan Perubahan Ekuitas

Tujuan laporan ekuitas yaitu menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi untuk periode;
  - b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
  - c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan;
  - d. untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
    - i. Laba atau rugi;
    - ii. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
    - iii. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.
- 2) Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 Laporan Laba Rugi SAK ETAP :

- a. Saldo laba pada awal periode pelaporan;
  - b. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode;
  - c. Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu;
  - d. Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi dan saldo laba pada akhir periode pelaporan.
4. Laporan Arus Kas

Menurut SAK ETAP laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut:

1) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah :

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
- b. Penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi, dan pendapatan lain;
- c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
- d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;
- e. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
- f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

2) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah :

- a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
- b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
- c. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture* (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);

- d. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari *joint venture* (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);
  - e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
  - f. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
- 3) Aktivitas Pendanaan
- Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah :
- a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain;
  - b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;
  - c. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;
  - d. Pelunasan pinjaman;
  - e. Pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Menurut SAK ETAP (2016:ETAP27) catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus:

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6;
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan

Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP (lihat paragraf 3.3);
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 8.5);
- c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- d. Pengungkapan lain.



## **2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 pasal 1 ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa pasal 1 ayat 6, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 (pasal 1 ayat 2) menjelaskan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

### **2.3.2 Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pembentukan BUMDes merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No 6 Tahun 2014 Bab 8 pasal 76, yaitu tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Sementara pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Peraturan yang mengatur secara rinci BUMDes terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau seluruh modal berasal dari desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. usaha yang dapat dijalankan pun harus berorientasi untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015 pasal 3, disebutkan juga bahwa pendirian BUMDes bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
8. Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, perlu adanya pembeda antara BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya. Tujuannya, agar keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan desa seperti yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, untuk mencegah sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat merusak kearifan kehidupan bermasyarakat di pedesaan.

## 2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1	Jayanti dan Qomari (2018)	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Surya Sejahtera” Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	SAK ETAP	Laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan atas berbagai transaksi yang dilakukan penggolongan transaksi pada BUMDesa “Surya Sejahtera” belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDesa	Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya EQUITY Volume 4 Issue 3 (2018)

					<p>“Surya Sejahtera” menyajikan</p> <p>laporan keuangan hanya tiga jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, dan kas sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.</p>	
2	Rudini, Nurhayati, dan Afriyanto (2016)	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Di Desa Langkitin	SAK ETAP	Laporan keuangan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi yang dilakukan Penggolongan transaksi pada BUMDes Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Langkitin menggunakan jurnal memorial untuk peringkasan dan neraca percobaan untuk pengikhtisaran sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes</p>	<p>Jurnal</p> <p>E-Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi, Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian Vol 2, No 1 (2016)</p>

					Langkitin menyajikan laporan keuangan hanya dalam dua jenis yaitu neraca dan laporan laba rugi sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	
3	Kalangi, Sondakh, dan Pratiwi (2014)	Analisis Penerapan Sak Etap Pada Penyajian Laporan Keuanganpt. Nichindo Manado Suisan	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil penelitian berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2011 dan 2012, menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan(CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan	Jurnal EMBA Vol.2 No.3 (September 2014), Hal. 254-265 ISSN 2303-1174

					menyusun komponen laporan keuangan lainnya dan mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan dalam CALK	
4	Fadlol, Kartini, dan Kantun (2018)	Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Oryza Mart Jember Periode 2017	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Oryza Mart Jember pada periode 2017 masih belum memenuhi kelengkapan menurut SAK ETAP. Oryza Mart belum menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan hanya menyusun 3 laporan keuangan yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal. Ketidaksesuaian juga terdapat di dalam Neraca, yaitu belum ada klasifikasi terpisah antara peralatan toko dan peralatan kantor, gedung	Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, dan Ilmu Sosial Universitas Jember Volume 12 Nomor 2 (2018) DOI: 10.19184/jpe.v12i2.8570 ISSN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175

					dan tanah. Selain itu, Oryza Mart belum memisahkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.	
5	Sakti (2017)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik (Sak Etap) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Studi Kasus Pada Tria's Cake & Bakery Di Blitar	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil penelitian pada Tria's Cake & Bakery menunjukkan bahwa laporan keuangan yang digunakan masih menggunakan <i>single entry</i> atau masih menggunakan pembukuan dengan menggunakan <i>cash basis</i> . Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat banyak kesalahan dalam pencatatan keuangannya. Pengakuan pendapatan yang seharusnya dicatat dalam akun pendapatan, dicatat menjadi akun kas yang menyebabkan laporan labanya mengalami kerugian. Begitu juga dalam pengakuan modalnya, Tria's Cake & Bakery belum	Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)

					sesuai dengan SAK ETAP.	
6	Andriani, Atmadja, and Sinarwati (2014)	Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Sak Etap Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) (Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon)	SAK ETAP	Laporan keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, alasan membuat pencatatan keuangan adalah untuk mempermudah pemilik dalam memberikan bonus kepada karyawannya, 2) Faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP pada Peggy Salon karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena kurangnya pengawasan dari stakeholder yang berkepentingan dengan laporan keuangan.	Jurnal e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol: 2 No: 1 (Tahun 2014)
7	Widyastuti (2017)	Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih	Jurnal Journal for Business and Entrepreneur

		Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa			dilakukan secara sederhana yang disebabkan kurangnya pengetahuan pengusaha terhadap tujuan, manfaat dan tahapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP. Berdasarkan hasil penelitian, perlu ada penyuluhan penerapan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP bagi para pelaku usaha sektor UMKM.	www.journal.uta45jakarta.ac.id Jurnal Online Nasional dan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  Vol. 1 No. 1 July – December 2017 ISSN 2501-6682
8	Norkamsiah, Kesuma (2016)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Penyusunan Laporan Keuangan	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh CV Aba Komputer belum menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP) dalam hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber manusia yang dimiliki.	Jurnal AKUNTABEL : Jurnal Ekonomi dan keuangan Volume 13, (2), <a href="http://journal.feb.unmul.ac.id">http://journal.feb.unmul.ac.id</a> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia.  ISSN print: 0216-7743 ISSN online: 2528-1135 (2016)
9	Singal, Ribka	Evaluasi Penyusunan	-Evaluasi penyusu	SAK ETAP	Hasil penelitian berdasarkan	Jurnal



	Agustine. Pinatik (2015)	Laporan Laba Rugi Dan Neraca Berdasarkan Sak Etap Pada Pt.Karunia Multiguna Abadi	nan laporan laba rugi -Evaluasi penyusunan neraca		penyajian laporan neraca dan laba rugi yang dibuat oleh PT.Karunia Multiguna Abadi pada bulan September tahun 2015 masih belum sesuai dengan kaidah SAK ETAP dan masih ada pengklasifikasian pos akun yang belum disajikan, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki. Sebaiknya manajemen perusahaan mempekerjakan karyawan yang terampil dalam bidang akuntansi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan laporan keuangan.	Jurnal EMBA 395 Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 395-403 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi ISSN 2303-1174
10	Kurniawansyah (2016)	Penerapan Pencatatan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Ukm Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro	Pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan	SAK ETAP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM belum membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan segala	Jurnal Dinamika Global : Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal Universitas Airlangga Surabaya

		Kabupaten Banyuwangi			<p>keterbatasan yang dimiliki. Kebutuhan dalam penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya. Responden mengakui pentingnya pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dalam mendukung keberlanjutan perusahaan, tetapi belum menerapkan sesuai SAK ETAP karena berbagai kendala. UMKM di Desa Gembongsari belum menerapkan pencatatan akuntansi sesuai standar baku dan belum menggunakan informasi akuntansi secara optimal.</p>	ISBN 978-602-60569-2-4 (2016)
--	--	----------------------	--	--	--	-------------------------------

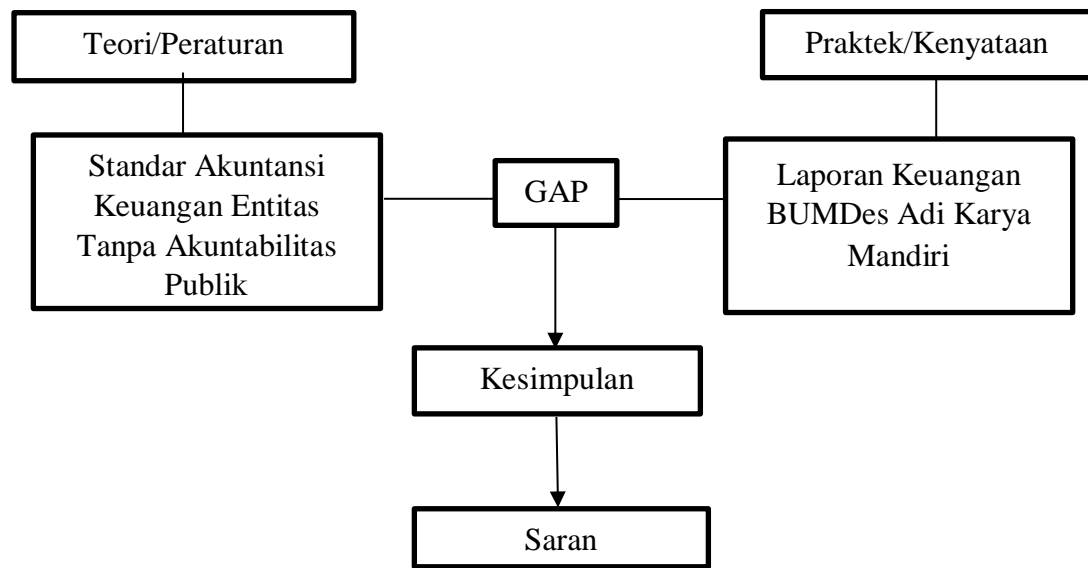
11	Ponomban, Yohanes. C. Saerang, David P.E. Wangkar (2016)	Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak-Etap Pada Cv. Bahu Bahtera Indah Manado	Laporan keuangan	SAK ETAP	Dari hasil penelusuran dan analisis terhadap CV. Bahu Bahtera Indah Manado mengenai penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di peroleh kesimpulan bahwa dalam penyajian laporan keuangan CV. Bahu Bahtera Indah Manado masih banyak perbedaan atau ketidaksesuaian dengan SAK-ETAP. Bahkan ada juga laporan-laporan keuangan yang tidak di terbitkan oleh CV. Bahu Bahtera Indah Manado padahal perlu di terbitkan menurut SAK-ETAP yaitu penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya ,dan juga uang muka dan pinjaman yang diberikan	Jurnal Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 622-630 ISSN 2303-1174
----	--	---	------------------	----------	--	---

					kepada pihak lain.	
12	Sinaga, Rani Cenni. Sondakh, Jullie J. Alexander (2016)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Atas Persediaan Pada Pt. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Cabang Tikala Baru	SAK ETAP	Laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAK ETAP atas Persediaan pada PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Cabang Tikala Baru belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang SAK ETAP. Sebaiknya pihak administrasi perusahaan menampilkan kartu persediaan secara keseluruhan, melakukan penilaian persediaan, pencatatan atas barang yang masuk dan keluar dari gudang, mengungkapkan	Jurnal Jurnal EMBA Vol.4 No.4September 2016, Hal. 1173-1182 ANALISIS  ISSN 2303- 1174

					jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode sehingga pengguna informasi keuangan dapat mudah mengerti serta meminimalisir kecurangan dan kerugian di PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Cabang Tikala Baru.	
13	(Yuliza 2016)	Analisis Penerapan Sak-Etap Pada Koperasi Di Universitas Pasir Pengaraian	Laporan keuangan	SAK ETAP	Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwasanya koperasi UPP belum memahami akuntansi koperasi yang seharusnya diterapkan oleh koperasi. Laporan keuangan koperasi UPP disusun secara bersama-sama oleh ketua, sekretaris, dan bendahara pada koperasi tersebut	Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 5 No. 2 Juli 2016
14	Apryanto, Juhanda. Khairani, Siti. Pratiwi (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Kasus	Laporan Keuangan	SAK ETAP	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Budi Daya Lele Mariani tidak melakukan pencacatan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku	Jurnal Jurusan Akuntansi Keuangan, STIE MDP, Palembang (2015)

		Pada Pengusaha Budidaya Lele Mariani)			pada SAK ETAP. Kendala yang ditemui memberikan penyimpangan dalam mengembangkan usaha Budi Daya Lele ini dan penyelesaian kendala yang ada membutuhkan pihak eksternal yang lebih memahami mengenai pencatatan akuntansi pada sistem laporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP. Sehingga, penerapan dilakukan memberikan bentuk pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP pada Budi Daya Lele Mariani serta pihak eksternal dapat memberikan kontribusi mengenai seluruh sistem pencatatan keuangan yang sesuai prosedur akuntansi kepada pelaku UMKM.	
--	--	---------------------------------------	--	--	---	--

## 2.4.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1  
Kerangka pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut yang tergambar diatas, dapat dideskripsikan seperti berikut bahwa dari perbandingan antara teori/peraturan yang di wakili oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dengan praktek/kenyataan yang di wakili oleh laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri. Lalu didapatkan sebuah GAP yang nantinya akan mengarah pada kesimpulan. Kemudian peneliti akan memberikan saran dari hasil penelitian ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut pendapat Sugiyono (2017: 11), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Peneliti ini dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam proses penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Penelitian ini membahas tentang penyusunan laporan keuangan. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data dan informasi merupakan respon dari bagian dalam suatu organisasi. Dalam hal ini unit analisisnya adalah bagian organisasi yaitu Badan Usaha Milik Desa Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Indonesia. Untuk mendapatkan data yang memadai, penulis langsung mengunjungi BUMDes Adi Karya Mandiri.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka seperti hasil wawancara, atau catatan laporan dan buku-buku. Data-data ini adalah data yang akan digunakan untuk pengembangan analisis itu sendiri. Pada dasarnya kegunaan data tersebut adalah sebagai dasar objektif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam penyelesaian persoalan yang sama.

Adapun Sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari unit analisis yang diteliti untuk memperoleh informasi langsung tentang kondisi organisasi kelompok secara keseluruhan, keterlibatan atau partisipasi anggota, persepsi langsung anggota terhadap BUMDes Adi Karya Mandiri Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor serta data lain yang perlu diamati secara langsung.
- b. Sumber Data Sekunder, data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari koran, majalah, jurnal, dan publikasi lainnya. pengumpulan data dilakukan untuk



memperoleh informasi tentang keragaman lokasi penelitian, kelembagaan formal dan pihak-pihak yang terkait dengan BUMDes Adi Karya Mandiri Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Ukuran
Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)	Laporan Keuangan BUMDes : a. Laporan Keuangan b. Laporan Laba/Rugi c. Laporan Perubahan Ekuitas d. Laporan Arus Kas e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	SAK ETAP

Sumber : Operasionalisasi Variabel diolah peneliti Tahun 2019

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

- a. *Field Research*, yaitu mengumpulkan melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan metode sebagai berikut :
  1. Metode Wawancara,  
Wawancara, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya-jawab dengan pihak BUMDes yang ditunjuk atau pejabat berwenang yang ada hubungannya dengan data-data yang akan diulas atau dibahas dalam penelitian ini.
  2. Metode Observasi,  
Observasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam perusahaan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan. Observasi tersebut dilakukan untuk dapat memperoleh sebuah keyakinan atas data yang didapat dari kenyataan yang ada.
  3. Dokumentasi,  
Peneliti memperoleh data dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dokumen BUMDes untuk dijadikan bahan penelitian. Adapun gunanya dokumentasi adalah untuk mengetahui informasi tentang data-datanya yang dipakai sebagai bahan untuk peneliti.

- b. *Library Research* (Riset Kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui study perpustakaan, dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen lembaga maupun literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

### **3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam usaha mencari dan mengumpulkan data untuk penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

1. Mengelompokkan catatan penelitian dengan tema yang dibutuhkan dari hasil observasi dan wawancara, catatan di peroleh dari lapangan dan data sekunder lainnya yang dibutuhkan.
2. Menganalisis penyusunan laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri dengan laporan keuangan yang lengkap berdasarkan SAK ETAP, seperti; laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
3. Menganalisis laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri apakah telah sesuai dengan SAK ETAP atau tidak.
4. Mencari tahu kendala dalam pembuatan laporan keuangan dengan cara mewawancarai pihak yang berwenang pada BUMDes tersebut.
5. Memberikan solusi yang dihadapi dalam menyelesaikan kendala-kendala di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Desa Sumur Batu

1. Kondisi Geografis

a. Letak Desa

Desa Sumur Batu terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Adapun batas-batas desa tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Gamblang

Sebelah Timur : Desa Karang Tengah

Sebelah Selatan : Desa Bojong Koneng

Sebelah Barat : Desa Babakan Madang

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Desa Sumur Batu yang terdiri atas 1.509 jiwa laki-laki dan 1.640 jiwa perempuan, sehingga jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 3.149 jiwa.

b. Sumber Mata Pencaharian Pokok

Sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Sumur Batu meliputi : Petani, Pengusaha/Pedagang, PNS, Tukang Kayu, Tukang Batu, Perbengkelan, Tukang Ojek, Kerajinan Tangan, Buruh Tani, Buruh Bangunan dan Karyawan Swasta.

3. Administrasi Desa

Pusat pemerintahan Desa Sumur Batu Terletak di RW 03 RT 08 Desa Sumur Batu. Untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki, karena berada di jalan poros yang terhubung langsung antar desa dan telah di hotmix. Secara administrasi Desa Sumur Batu terdiri dari 5 RW dan 15 RT.

Setiap ketua RT dan Ketua RT sebagai koordinator di setiap wilayah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan ke Bupati melalui Camat, kemudian dari pada itu Kepala Desa bersama dengan BPD setiap tahun wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakatnya melalui forum Musyawarah Desa.

##### 4.1.2 Sejarah dan Perkembangan Pengeolalan Pabrikasi Tong Sampah BUMDes Adi Karya Mandiri

Bumdes Adi Karya Mandiri Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor di bentuk melalui forum Musyawarah Desa Sumur Batu pada tanggal 12 Desember 2014. Pengelolaan Pabrikasi Tong Sampah yang dikelola secara profesional akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam hal kualitas produk. Di sisi lain akan memberikan tambahan pendapatan asli desa dalam bentuk sisa hasil usaha yang wajib di setor ke kas desa setiap tahun.

1. Latar Belakang Pemilihan Usaha

Desa Sumur Batu memiliki potensi yang besar untuk di kembangkan. Salah satu faktor yang mendukung usaha tersebut ialah dengan tidak adanya pesaing. Di sisi lain

bisa memberikan kontribusi finansial kepada Desa. Berdasar keadaan tersebut, BUMDes Adi Karya Mandiri menjadikan pengelolaan Pabrikasi Tong Sampah menjadi salah satu usaha unit usaha.

## 2. Perencanaan Produk

Produk yang akan dihasilkan oleh Unit Usaha Pengelolaan Pabrikasi Tong Sampah adalah produk tong sampah dari bahan dasar Vibber. Produk ini sangat efisien, kualitas bagus dan juga banyak diminati masyarakat.

## 3. Perencanaan Pemasaran

Pasar yang dibidik adalah warga masyarakat Desa Sumur Batu, perhotelan, pariwisata, rumah sakit, sarana pendidikan, dan mall-mall. Potensi pasar tersebut juga menjadi semakin kuat karena di Desa Sumur Batu dan sekitarnya tidak ada pihak yang membuka usaha sejenis. Dengan demikian, kegiatan usaha pengelolaan air tidak ada pesaingnya. Agar pasar tetap terjaga dengan baik, ada 2 (dua) strategi yang ditempuh, yaitu :

### a. Strategi harga

Strategi penentuan harga produk yang disesuaikan dengan ukuran dan desain produk tersebut.

### b. Strategi distribusi

Strategi distribusi dilaksanakan dengan memaksimalkan pengiriman sesuai pesanan dan juga dengan armada yang aman terhadap produk, sehingga konsumen menerima produk dalam keadaan sesuai pesanan.

## 4. Perencanaan Manajemen

### a. Kompetensi yang dimiliki pengelola dapat dimanfaatkan secara optimal, karena mereka:

- i. Memahami kondisi masyarakat Desa Sumur batu.
- ii. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pengelolaan Pibber.
- iii. Memiliki pengalaman organisasi.

### b. Strategi manajemen yang di jalankan meliputi:

#### i. Manajemen Pelayanan

Manajemen pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan yang cepat, tepat, senyum dan sapa.

#### ii. Manajemen Pengelolaan

Pengelolaan dilakukan dengan standar manajemen yang profesional yang berbasis kinerja.

#### iii. Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan dikelola dengan standar akuntansi keuangan yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.

#### iv. Manajemen Peningkatan Kapasitas SDM

Pengelola Unit Usaha dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pengelola unit usaha diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokoknya.

## 5. Perencanaan Pengoperasian

Untuk mengoperasikan kegiatan usaha pengelolaan Pabrikasi Tong Sampah dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Bahan baku produk yang dijual adalah tong sampah pibber.

## 6. Perencanaan Keuangan

### a. Modal Kerja

Untuk menjalankan kegiatan usaha pabrikasi tong sampah diperlukan dana sebagai modal awal sebesar Rp 100.000.000,-. Dana ini digunakan sebagai investasi sebesar Rp 35.000.000,- dan Rp 65.000.000,- sisanya untuk modal kerja. Kebutuhan dana untuk modal usaha ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

### b. Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis keuangan dari kajian kelayakan yang dilakukan, penyusunan perkiraan arus kas digambarkan sebagaimana contoh tersebut diambil dari data kajian kelayakan kegiatan usaha pengelolaan pabrikasi tong sampah BUMDes Adi Karya Mandiri.

Target penjualan/hari sebanyak 10 unit dengan harga Rp 250.000 dan pembulatan dari hari kerja yaitu 25 hari, jadi dalam 1 bulan target penjualan sebanyak 250 unit. Dengan demikian rata-rata pendapatan kotor per bulan yang diterima sebesar :

$$= 10 \times 25 \times \text{Rp } 250.000 = \text{Rp } 62.500.000$$

Pendapatan kotor per tahun sebesar

$$= \text{Rp } 62.500.000 \times 12$$

$$= \text{Rp } 750.000.000$$

Pendapatan usaha dapat di proyeksikan sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Perkiraan Arus Kas Unit Usaha Pabrikasi Tong Sampah  
BUMDes  
Adi Karya Mandiri di Desa Sumur Batu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor

No	Uraian	Tahun Ke				
		1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ARUS KAS MASUK</b>					
2	Penjualan dari produk Tong Sampah	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
	Total Arus Kas Masuk	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
<b>B</b>	<b>ARUS KAS KELUAR</b>					
1	ATK	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Insentif Pengelola	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
3	Lain-lain	0	0	0	0	0
	Total Arus Kas Keluar	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
	<b>TOTAL KAS BERSIH (A-B)</b>	<b>712.000.000</b>	<b>712.000.000</b>	<b>712.000.000</b>	<b>712.000.000</b>	<b>712.000.000</b>

Sumber : Adart BUMDes Adi Karya Mandiri 2020

Data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa, arus kas bersih adalah positif, artinya pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran. Kegiatan usaha ini layak diijalankan, karena potensial mendapatkan keuntungan. Pendapatan yang dapat di terima BUMDes Adi Karya Mandiri dapat di tingkatkan lagi melalui penabahan pelanggan.

### 4.1.3 Kegiatan Usaha

#### 1. Unit Usaha

Unit usaha Bumdes Adi Karya Mandiri meliputi :

Unit Usaha Pengelolaan Pabrikasi Tong Sampah, BUMDes Adi Karya Mandiri sudah banyak menerima pesanan tong sampah dari berbagai tempat seperti kantor-kantor, sekolah, universitas, masyarakat dan lainnya.

2. Sumber Keuangan :
  - a. Penyertaan modal Desa;
  - b. Penyertaan modal kelompok masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan; dan/atau
  - c. Bantuan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan swasta yang diajukan untuk pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi

##### 1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi kepengurusan Bumdes Adi Karya Mandiri Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang terdiri dari :

Penasehat : Kepala Desa Sumur Batu

Ketua : Acep Bin Cecep

Sekretaris : Eka Nurdiyati

Bendahara : Nelpiana

Manager : Budianto

Pengawas : Aspani

##### 2. Visi dan Misi

###### a. Visi Bumdes :

Terwujudnya Kemandirian masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera berlandaskan iman dan takwa kepada Allah SWT.

###### b. Misi Bumdes :

- i. Mendorong berkembangnya usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- ii. Menampung berbagai usaha ekonomi yang ditekuni masyarakat.
- iii. Mendorong dan memfasilitasi proses penguatan kelembagaan usaha masyarakat.
- iv. Menciptakan ruang dan peluang terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan.
- v. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha dan pertanggungjawaban keuangan.

##### 3. Tujuan Bumdes :

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa di kawasan perdesaan.
- b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (wirausaha masyarakat desa yang berpenghasilan rendah).
- c. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- d. Meningkatkan pengolahan potensi desa di kawasan perdesaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

##### 4. Badan Hukum

Bumdes Adi Karya Mandiri belum berbadan hukum, namun legal karena telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sehingga pendiriannya telah memiliki alas

hukum. Peraturan Kepala Desa tentang pendirian Bumdes Adi Karya Mandiri tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terutama UU Nomor 6/2014 tentang Desa, dan Permendesa PDTT Nomor 4/2015 tentang Tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Bumdes.

#### **4.2 Pelaksanaan Penerapan SAK ETAP Laporan Keuangan pada BUMDes Adi Karya Mandiri**

Pelaporan keuangan BUMDes merupakan tahap akhir dalam siklus akuntansi sebagai pelaporan akhir. Laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang dapat dipakai untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Laporan keuangan dapat memberikan informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil yang dapat dicapai oleh BUMDes tersebut dalam periode tertentu sehingga dari laporan keuangan inilah yang dijadikan pedoman dalam melakukan penilaian oleh pihak yang bekerjasama dengan BUMDes, baik itu pihak internal maupun eksternal. Sehingga penyusunan laporan keuangan selalu dimaksimalkan agar memenuhi persyaratan dalam akuntansi, secara fungsinya, relevansinya, dan kemudahan untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut.

SAK ETAP sendiri, laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Sedangkan dalam laporan keuangan BUMDes “Adi Karya Mandiri” yang disajikan hanya Laporan Laba-Rugi. Hal tersebut sebenarnya tidaklah mengherankan, dalam BUMDes “Adi Karya Mandiri” laporan keuangan disusun oleh satu orang yang memegang dua tanggung jawab dimana sebagai ketua BUMDes dan merangkap menjadi bendahara. Segala pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan BUMDes tersebut hanya diserahkan kepada satu orang saja yang mengurus semua keuangan BUMDes dari mulai pencatatan transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Selain itu, pencatatan laporan keuangan masih dilakukan secara manual belum melalui sistem.

Menurut Bapak Budi selaku Ketua dan Bendahara BUMDes “Adi Karya Mandiri” juga menyatakan :“ Banyak masalah dalam proses pencatatan laporan keuangan selama ini, karena saya bekerja merangkap berbagai pekerjaan dan memang *basic* saya kurang memahami akan pembukuan laporan keuangan. Sebenarnya dulu ada bendahara yang mengatur akan tetapi sekarang tidak ada, sehingga saya yang mengurusnya namun tidak terkendali. Dan saya belum pernah mendengar tentang SAK ETAP, sehingga saya belum menguasai dan menerapkannya dalam laporan keuangan”.

BUMDes Adi Karya Mandiri melapor kepada Kepala Desa hanya memberikan laporan perhitungan laba/rugi yang di peroleh saja, namun dalam laporan tersebut tidak merincikan sumber pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam periode berjalan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman atas penyusunan laporan keuangan yang benar sesuai dengan standar laporan keuangan di karenakan di BUMDes Adi Karya Mandiri kekurangan tenaga ahli dalam mengelola administrasi BUMDes, sehingga terjadinya *multi-tasking* dalam pengerjaan tugas yang di alami oleh ketua BUMDes. Maka hal ini menimbulkan masalah ketika dana BUMDes yang dikelola dari kegiatannya dikelola apa adanya tanpa melalui proses pencatatan yang berdasarkan dengan SAK ETAP.

### **4.3 Analisis Laporan Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri dengan SAK ETAP**

#### **4.3.1 Pengakuan Akun Laporan Posisi Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri**

Laporan posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

##### **4.3.1.1 Aset**

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan manfaat ekonominya dimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya di pandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.

##### **a. Aset Lancar**

##### **1. Kas**

SAK ETAP paragraph 7.1 menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Paragraf 7.2 setara kas adalah investasi jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Paragraf 7.16 entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam arus kas dengan pos yang sama yang di sajikan dalam laporan posisi keuangan.

Kas di BUMDes Adi Karya Mandiri merupakan sejumlah uang tunai yang di peroleh dari hasil penjualan. Dan pada tahun 2017 dan 2018 terdapat kas bendaharawan, yaitu sejumlah uang tunai yang di dapatkan dari bendahara desa yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Transaksi yang dilakukan oleh BUMDes Adi Karya Mandiri belum di catat dengan buku catatan kas. Pada tahun 2017 hingga saat ini tidak ada buku catatan uang masuk dan keluar dengan detail dan rapi karena kekurangan pekerja sehingga tidak ada yang bertanggungjawab mengurus bagian keuangan BUMDes. BUMDes Adi Karya Mandiri belum membuat laporan posisi keuangan dan pencatatan kas hanya di catat hanya pada tahun 2017 awal saja dan yang ada tinggal bukti-bukti transaksi sehingga harus di rekap dari awal agar tersusun dan data menjadi benar. Pengakuan kas menurut SAK ETAP harus di akui dalam laporan posisi keuangan, sehingga pengakuan kas pada BUMDes Adi Karya Mandiri belum sesuai dengan SAK ETAP karena belum membuat laporan posisi keuangan dan tidak ada catatan dengan lengkap. Seharusnya BUMDes Adi Karya Mandiri membuat catatan kas masuk dan keluar selama periode berjalan agar kas yang dimiliki dapat terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan hasil transaksi-transaksi yang ada.



## 2. Persediaan

BUMDes Adi Karya Mandiri tidak membuat akun persediaan pada laporan kauangannya, karena tidak membuat laporan posisi keuangan. Persediaan bahan baku dan persediaan bahan pembantu diperoleh saat BUMDes Adi Karya Mandiri akan belanja bahan baku dan bahan pembantu jika terjadi pemesanan sehingga tidak membeli bahan-bahan produksi dalam jumlah yang besar kemudian menyimpannya sebagai persediaan. Jika seperti itu seharusnya saat terjadinya transaksi BUMDes Adi Karya Mandiri langsung di catat sebagai penjualan. Dan sebelum menjual untuk mengukur nilai sudah tercantum pada SAK ETAP.

SAK ETAP paragraf 11.3 Entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. BUMDes Adi Karya Mandiri sudah memenuhi nilai persediaan berdasarkan uang yang di keluarkan untuk mendatangkan persediaan sampai masuk ke tempat usaha, namun BUMDes Adi Karya Mandiri tidak membuat laporan posisi keuangan hanya mencatat dalam buku catatan saja maka tidak sesuai dengan SAK ETAP.

### b. Aset Tetap

BUMDes Adi Karya Mandiri tidak membuat pengakuan aset tetap karena tidak membuat laporan posisi keuangan. Aset tetap pada SAK ETAP paragraf 15.4 diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan manfaat ekonominya dimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tetap tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode laporan berjalan. Sebagai alternatif tersebut menimbulkan pengakuan biaya dalam laporan laba rugi. Pada saat pengakuan awal aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Pengakuan aset yang dilakukan BUMDes Adi Karya Mandiri tidak sesuai dengan SAK ETAP karena belum mencatat pembelian aset. Seharusnya BUMDes Adi Karya Mandiri harus mencatat setiap pembelian aset tetap dan mengakui dalam laporan posisi keuangan jika terdapat manfaat ekonominya dimasa depan.

#### **4.3.1.2 Kewajiban**

Paragraf 2.35 Pengakuan kewajiban menurut SAK ETAP diakui dalam posisi laporan keuangan jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Pengakuan kewajiban BUMDes Adi Karya Mandiri tidak sesuai dengan SAK ETAP karena belum mencatat dan belum membuat laporan posisi keuangan. Seharusnya BUMDes Adi Karya mandiri mengakui kewajiban atas transaksi selama periode berjalan yang jumlahnya harus diselesaikan.

#### **4.3.1.3 Ekuitas**

Menurut SAK ETAP paragraf 19.25 Modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor, nilai nominalnya dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam laporan posisi keuangan. Modal BUMDes Adi Karya Mandiri berasal dari pemerintah desa seharusnya dicatat dalam laporan posisi keuangan namun

dalam pelaksanaannya belum mencatat dan belum membuat laporan posisi keuangan. BUMDes Adi Karya Mandiri harus mencatat modal yang diterima maupun yang dikeluarkan karena modal digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Tabel 4.2  
Perbandingan Pengakuan Laporan Posisi Keuangan  
BUMDes Adi Karya Mandiri Dengan Ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP	BUMDes Adi Karya Mandiri	Kriteria
Paragraf 7.16 entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.	Pengakuan kas pada BUMDes Adi Karya Mandiri belum sesuai dengan SAK ETAP karena belum membuat laporan posisi keuangan dan tidak ada catatan dengan lengkap. Seharusnya BUMDes Adi Karya Mandiri membuat catatan kas masuk dan keluar selama periode berjalan agar kas yang dimiliki dapat terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan hasil transaksi-transaksi yang ada.	Tidak Sesuai
paragraf 11.3 Entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual.	BUMDes Adi Karya Mandiri tidak membuat akun persediaan pada laporan keuangannya, karena tidak membuat laporan posisi keuangan. BUMDes tidak membeli bahan-bahan produksi dalam jumlah yang besar kemudian menyimpannya sebagai persediaan. Maka seharusnya BUMDes Adi Karya Mandiri langsung di catat sebagai penjualan.	Tidak Sesuai
Aset tetap pada SAK ETAP paragraf 15.4 diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan manfaat ekonominya dimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tetap tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode laporan berjalan. Sebagai alternative tersebut menimbulkan pengakuan biaya dalam laporan laba rugi. Pada saat pengakuan awal aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan.	Pengakuan aset yang dilakukan BUMDes Adi Karya Mandiri belum sesuai dengan SAK ETAP karena belum mencatat pembelian aset. Seharusnya BUMDes Adi Karya Mandiri harus mencatat setiap pembelian aset tetap dan mengakui dalam laporan posisi keuangan jika terdapat manfaat ekonominya dimasa depan.	Tidak Sesuai
Paragraf 2.35 Pengakuan kewajiban menurut SAK ETAP diakui dalam posisi laporan keuangan jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan	Pengakuan kewajiban BUMDes Adi Karya Mandiri belum sesuai dengan SAK ETAP karena belum mencatat dan belum membuat catatan hutang dan belum membuat laporan posisi	Tidak Sesuai

kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.	keuangan. Seharusnya BUMDes Adi Karya mandiri mengakui kewajiban atas transaksi selama periode berjalan yang jumlahnya harus diselesaikan.	
SAK ETAP paragraph 19.25 Modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor, nilai nominalnya dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam laporan posisi keuangan.	Modal BUMDes Adi Karya Mandiri berasal dari pemerintah desa seharusnya dicatat dalam laporan posisi keuangan namun dalam pelaksanaannya belum mencatat dan belum membuat laporan posisi keuangan tersebut.	Tidak Sesuai

Sumber : Diolah penulis 2020

### 4.3.2 Pengukuran Akun Laporan Posisi Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri

#### 4.3.2.1 Aset

##### a. Aset Lancar

##### 1. Kas

BUMDes Adi Karya Mandiri belum melakukan pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kas dalam laporan keuangan. Untuk mengukur kas hanya dengan menghitung nilai yang tersisa saja dan tidak ada catatan yang rinci mengenai pemasukan dan pengeluaran kas saat terjadinya transaksi karena tidak ada yang dapat memegang tugas tersebut. Menurut SAK ETAP paragraf 2.31 dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Seharusnya BUMDes Adi Karya Mandiri mengukur kas dengan biaya historis yaitu kas atau setara kas yang telah dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset dari perolehan. Lalu dicatat dengan rapi sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada.

##### 2. Persediaan

BUMDes Adi Karya Mandiri tidak mengukur persediaan. SAK ETAP paragraf 11.3 menyatakan entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual di kurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Paragraf 11.4 biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Seharusnya mengukur persediaan dengan harga perolehan saat persediaan telah siap di jual. Namun BUMDes Adi Karya Mandiri tidak menyimpan persediaan, karena BUMDes hanya membuat produk jika ada pembelian atau pesanan saja. Sehingga setelah membeli persediaan bahan baku dan bahan pembantu nilai penjualan dihitung dari perkiraan saja belum dihitung secara detail dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

##### b. Aset Tetap

BUMDes Adi Karya Mandiri tidak melakukan pengukuran pada akun aset tetap karena tidak membuat laporan posisi keuangan, seharusnya mengukur aset tetap berdasarkan harga perolehan sesuai dengan SAK ETAP dalam paragraf 15.6

dijelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, aset tetap harus mengukur berdasarkan harga perolehan. Paragraf 15.22 menyatakan suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih, antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*).

#### 4.3.2.2 Kewajiban

Pengukuran pada kewajiban tidak dilakukan oleh BUMDes Adi Karya Mandiri. Seharusnya BUMDes Adi Karya Mandiri mengukur kewajiban dicatat sesuai dengan aset yang diterima. Seperti menurut SAK ETAP paragraf 2.31 kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Sehingga pengukuran kewajiban BUMDes Adi Karya Mandiri tidak sesuai dengan SAK ETAP.

#### 4.3.2.3 Ekuitas

SAK ETAP pada paragraf 2.19 ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan kewajiban. Ekuitas mungkin disub klasifikasikan dalam laporan posisi keuangan. BUMDes Adi Karya Mandiri tidak mengukur besarnya modal, sehingga berapa besarnya modal tidak diketahui. Dalam pelaksanaannya modal dari BUMDes Adi Karya Mandiri berasal dari Pemerintah Desa. Dan seharusnya mengukur besarnya modal yang diterima dikurangi dengan kewajiban.

Tabel 4.3  
Perbandingan Pengukuran Laporan Posisi Keuangan  
BUMDes Adi Karya Mandiri Dengan Ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP	BUMDes Adi Karya Mandiri	Kriteria
SAK ETAP paragraf 2.31 dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan.	BUMDes Adi Karya Mandiri belum melakukan pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kas dalam laporan keuangan. Seharusnya BUMDes Adi Karya Mandiri mengukur kas dengan biaya historis yaitu kas atau setara kas yang telah dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset dari perolehan.	Tidak Sesuai
SAK ETAP paragraf 11.3 menyatakan entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual di kurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual.	BUMDes Adi Karya Mandiri tidak mengukur persediaan. Seharusnya mengukur persediaan dengan harga perolehan saat persediaan telah siap di jual. Namun BUMDes Adi Karya Mandiri tidak menyimpan persediaan, karena BUMDes hanya	Tidak Sesuai

	membuat produk jika ada pembelian atau pesanan saja.	
SAK ETAP dalam paragraf 15.6 dijelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, aset tetap harus mengukur berdasarkan harga perolehan.	BUMDes Adi Karya Mandiri tidak melakukan pengukuran pada akun aset tetap BUMDes Adi Karya Mandiri tidak melakukan pengukuran pada akun aset tetap karena tidak membuat laporan posisi keuangan, seharusnya mengukur aset tetap berdasarkan harga perolehan.	Tidak Sesuai
SAK ETAP paragraf 2.31 kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.	Pengukuran pada akun hutang tidak dilakukan oleh BUMDes Adi Karya Mandiri. Seharusnya BUMDes Adi Karya Mandiri mengukur kewajiban dicatat sesuai dengan aset yang diterima.	Tidak Sesuai
SAK ETAP pada paragraf 2.19 ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan kewajiban. Ekuitas mungkin disub klasifikasikan dalam laporan posisi keuangan. BUMDes Adi Karya Mandiri tidak mengukur besarnya modal yang disetor diawal, sehingga berapa besarnya modal tidak diketahui.	Bumdes Adi Karya Mandiri tidak mengukur modal. Dalam pelaksanaannya modal dari BUMDes Adi Karya Mandiri berasal dari Pemerintah Desa. Dan seharusnya mengukur besarnya modal yang diterima dikurangi dengan kewajiban.	Tidak Sesuai

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

### 4.3.3 Pengakuan Akun Laporan Laba Rugi BUMDes Adi Karya Mandiri

#### 4.3.3.1 Pendapatan

BUMDes Adi Karya mandiri mengakui pendapatan dari transaksi penjualan selama periode berjalan. Dalam SAK ETAP 2.36 Pengakuan pendapatan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

#### 4.3.3.2 Biaya

BUMDes Adi Karya Mandiri mengakui biaya pada laporan laba rugi sehingga biaya akan mengurangi pendapatan yang diterima. Pada pelaksanaannya BUMDes Adi Karya Mandiri belum menspesifikasikan secara detail biaya apa saja, namun semua pengeluaran di anggap sebagai biaya yang akan mengurangi pendapatan. Dalam SAK ETAP pengakuan biaya merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Biaya diakui dalam laporan laba rugi jadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah

terjadi dan dapat diukur secara andal. Pengakuan yang dilakukan BUMDes Adi Karya Mandiri sudah sesuai dengan SAK ETAP.

Tabel 4.4

**Perbandingan Pengakuan Laporan Laba Rugi  
BUMDes Adi Karya Mandiri Dengan Ketentuan SAK ETAP**

SAK ETAP	BUMDes Adi Karya Mandiri	Kriteria
Dalam SAK ETAP 2.36 Pengakuan pendapatan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.	BUMDes Adi Karya mandiri mengakui pendapatan dari transaksi penjualan selama periode berjalan	Sesuai
SAK ETAP pengakuan biaya merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Biaya diakui dalam laporan laba rugi jadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.	BUMDes Adi Karya Mandiri mengakui biaya pada laporan laba rugi sehingga biaya akan mengurangi pendapatan yang diterima.	Sesuai

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

#### **4.3.4 Pengukuran Akun Laporan Laba Rugi BUMDes Adi Karya Mandiri**

##### **4.3.4.1 Pendapatan**

Pengukuran pendapatan BUMDes Adi Karya Mandiri dengan cara menghitung jumlah pendapatan yang didapatkan dari hasil penjualan. Dari aktivitas penjualan tersebut akan didapat sejumlah pendapatan yang akan diakui sebagai pendapatan BUMDes. Dalam SAK ETAP paragraf 20.3 Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. BUMDes Adi Karya Mandiri sudah mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar dengan mengukur pendapatan atas pembayaran dari penjualan yang diterima.

##### **4.3.4.2 Biaya**

Pengukuran Biaya BUMDes Adi Karya Mandiri, diukur dari berapa besar kas yang dikeluarkan untuk biaya. Dengan kata lain diukur dengan berdasarkan nilai wajar pengeluaran yang dikeluarkan dari BUMDes Adi Karya Mandiri. Hal ini sesuai dengan definisi penyajian wajar menurut SAK ETAP yaitu penyajian yang jujur dari pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk aset, kewajiban, dan biaya. Biaya diakui pada laporan laba rugi dan diukur berdasarkan nilai wajar.

Tabel 4.5  
Perbandingan Pengukuran Laporan Laba Rugi  
BUMDes Adi Karya Mandiri Dengan Ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP	BUMDes Adi Karya Mandiri	Kriteria
Paragraf 20.3 Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.	Pengukuran pendapatan BUMDes Adi Karya Mandiri dengan cara menghitung jumlah kas yang didapatkan dari hasil penjualan.	Sesuai
Penyajian wajar menurut SAK ETAP yaitu penyajian yang jujur dari pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk aset, kewajiban, dan biaya. Biaya diakui pada laporan laba rugi dan diukur berdasarkan nilai wajar.	Pengukuran Biaya BUMDes Adi Karya Mandiri, diukur dari berapa besar kas yang dikeluarkan untuk biaya. Dengan kata lain diukur dengan berdasarkan nilai wajar pengeluaran yang dikeluarkan dari BUMDes Adi Karya Mandiri.	Sesuai

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

Hasil dari laba/rugi BUMDes dialokasikan dalam beberapa pos dengan pembagian presentase sesuai dalam ad/art BUMDes “Adi Karya Mandiri” antara lain:

- a. Desa sebesar 30%
- b. BUMDes 40%
- c. Kegiatan Masyarakat 10%
- d. Karyawan BUMDes 15 %

Apabila dalam akhir periode atau tahun entitas memperoleh Laba/Rugi, maka akan dialokasikan ke dalam pos-pos yang telah ditetapkan dalam rapat anggota menurut persentasi tertentu. Laporan tersebut dikenal dengan sebutan Laporan Hasil Sisa Usaha (SHU).

#### 4.3.5 Laporan Perubahan Ekuitas

SAK ETAP Paragraf 6.3 Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi untuk periode
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- c. Jumlah investasi, deviden dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan deviden serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

BUMDes Adi Karya Mandiri belum membuat laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangannya maka tidak sesuai dengan SAK ETAP. Seharusnya setelah

membuat laporan laba rugi BUMDes Adi Karya Mandiri membuat laporan perubahan ekuitas yang menyajikan sesuai dengan SAK ETAP.

#### **4.3.6 Laporan Arus Kas**

SAK ETAP paragraf 7.1 mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atau kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. SAK ETAP mengajurkan laporan arus kas dibuat dengan metode tidak langsung. BUMDes Adi Karya Mandiri belum membuat laporan arus kas dalam laporan keuangannya karena ketidaktahuan akan membuat laporan arus kas, sehingga laporan arus kas tidak sesuai dengan SAK ETAP.

#### **4.3.7 Catatan Atas Laporan Keuangan**

BUMDes Adi Karya Mandiri dalam penyusunan laporan keuangannya belum membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dikarenakan ketidaktahuan mengenai komponen lengkap laporan keuangan dan laporan keuangan yang dibuat sebelumnya hanya laporan laba rugi saja, hal itu didasari dengan keterbatasan pengetahuan dari pemilik maupun karyawan BUMDes Adi Karya Mandiri.

Dalam SAK ETAP paragraf 8.2 Catatan atas laporan keuangan harus:

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

#### **4.3.8 Kendala yang dihadapi BUMDes Adi Karya Mandiri Dalam Penerapan SAK ETAP**

Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan sulitnya penerapan SAK ETAP tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis terdapat beberapa hal yang menghambat penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri

1. Rendahnya pemahaman pemilik terhadap SAK ETAP
2. Belum adanya pendamping yang intensif terkait penerapan SAK ETAP
3. Kurangnya sosialisasi kepada BUMDes terkait Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia selaku pencetus pedoman standar ini
4. Terjadinya *multi-tasking* dalam pengerjaan tugas yang dialami oleh ketua BUMDes dalam hal administrasi dan keuangan sehingga data-data transaksi berantakan.
5. Kurangnya pengawasan dari pihak-pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri.



### 4.3.9 Penyajian Laporan Keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Pengakuan dari data BUMDes Adi Karya Mandiri antara lain bukti-bukti transaksi, laporan laba rugi namun dalam pembuatan laporan laba rugi belum menggunakan standar dalam pembuatan laporan keuangan yang benar. Pada kasus ini BUMDes Adi Karya Mandiri belum membuat laporan keuangan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP, sehingga penulis merekomendasikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

#### 4.3.9.1 Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016

Dalam laporan keuangan tahun 2016 tidak ada transaksi yang dapat diolah, di karenakan tidak adanya transaksi. Hasil wawancara dengan Ketua BUMDes bahwa tahun 2016 BUMDes Adi Karya Mandiri baru terbentuk dan masih perencanaan dalam pembangunan usaha BUMDes tersebut. Jadi BUMDes baru menjalankan usahannya dari tahun 2017 hingga saat ini.

Data-data yang diperlukan untuk membuat laporan posisi keuangan antara lain :

- a. Data-data bukti transaksi pemasukan dan pengeluaran BUMDes Adi Karya Mandiri, mengelompokan data aset yang terdiri dari aset lancar, aset tetap.
- b. Data penyusutan aset yang dimiliki oleh BUMDes Adi Karya Mandiri dimana perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus.
- c. Data kewajiban BUMDes Adi Karya Mandiri.
- d. Data ekuitas BUMDes Adi Karya Mandiri.
- e. Data pendapatan atas penjualan barang produksi BUMDes Adi Karya Mandiri.
- f. Data pembelian bahan produksi BUMDes Adi Karya Mandiri.
- g. Data biaya-biaya BUMDes Adi Karya Mandiri.
- h. Membuat jurnal, memposting kebuku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, neraca lajur, kemudian membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

#### 4.3.9.2 Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017

##### a. Penyajian Laporan Posisi Keuangan 2017

BUMDes Adi Karya Mandiri belum membuat laporan posisi keuangan pada laporan keuangannya. Sehingga penulis merekomendasikan laporan posisi keuangan dengan metode *accrual basis*.

Tabel 4.6  
Laporan Posisi Keuangan 2017

**BUMDES ADI KARYA MANDIRI**  
**DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**TAHUN 2017**

ASET		HUTANG	
Aset Lancar		Hutang	-
Kas	Rp 115.234.000		
Kas Bendahawan	Rp 8.673.500		
Piutang	Rp 13.485.000		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>Rp 137.392.500</b>	<b>Jumlah Hutang</b>	<b>Rp -</b>
Aset Tetap			
Perlengkapan	Rp 401.500	<b>MODAL</b>	
Peralatan	Rp 9.428.000	Modal Akhir	Rp 143.339.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp (3.883.000)		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>Rp 5.946.500</b>	<b>Jumlah Modal</b>	<b>Rp 143.339.000</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Rp 143.339.000</b>	<b>Jumlah Hutang + Modal</b>	<b>Rp 143.339.000</b>

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

b. Laporan Laba Rugi 2017

BUMDes Adi Karya Mandiri sudah membuat laporan laba rugi, namun masih belum sesuai dengan SAK ETAP karena tidak membuat rincian biaya-biaya dan membuat harga pokok penjualan. Sehingga penulis merekomendasikan laporan laba rugi dan yang sesuai dengan SAK ETAP.

Tabel 4.7  
Laporan Laba Rugi 2017

**BUMDES ADI KARYA MANDIRI**  
**DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**TAHUN 2017**

PENJUALAN		Rp 208.695.000
HPP :		
Bahan Baku Langsung	Rp 9.136.500	
Tenaga Kerja Langsung	Rp 53.391.000	
OVERHEAD PABRIK :		
Bahan Pembantu	Rp 21.653.500	
Biaya Listrik	Rp 1.920.000	
Biaya Sewa Bangunan	Rp 6.000.000	
Biaya Penyusutan Peralatan	Rp 3.883.000	
Biaya Perlengkapan	Rp 500.000	
<b>TOTAL HARGA POKOK PRODUKSI</b>		<b>Rp (96.484.000)</b>

LABA KOTOR		Rp 112.211.000
Biaya-Biaya :		
Biaya Seragam	Rp 24.000	
Biaya Iklan	Rp 1.335.000	
Biaya Angkut	Rp 3.400.000	
Biaya Keamanan	Rp 50.000	
Biaya Reparasi	Rp 90.244.500	
Biaya Administrasi	Rp 3.680.000	
JUMLAH BIAYA		Rp 98.733.500
<b>LABA/(RUGI)</b>		<b>Rp 13.477.500</b>

Sumber : Diolah oleh Penulis 202

Tabel 4.8  
Laporan Sisa Hasil Usaha 2017

**BUMDES ADI KARYA MANDIRI  
DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG  
LAPORAN SISA HASIL USAHA  
TAHUN 2017**

Desa	30%	Rp	4.043.250
BUMDes	40%	Rp	5.391.000
Kegiatan Masyarakat	10%	Rp	1.347.750
Karyawan	20%	Rp	2.695.500
<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>13.477.500</b>

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

c. Laporan Perubahan Ekuitas 2017

BUMDes Adi Karya Mandiri belum membuat laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangannya. Sehingga penulis merekomendasikan laporan perubahan ekuitas.

Tabel 4.9  
Laporan Perubahan Modal 2017

**BUMDES ADI KARYA MANDIRI  
DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG  
LAPORAN PERUBAHAN MODAL  
TAHUN 2017**

Modal Awal		Rp 129.861.500
Laba Bersih 2017	Rp 13.477.500	
<b>Modal Akhir Desember 2017</b>		<b>Rp 143.339.000</b>

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

## d. Laporan Arus Kas 2017

BUMDes Adi Karya Mandiri belum membuat laporan arus kas pada laporan keuangannya. Sehingga penulis merekomendasikan laporan perubahan arus kas dengan metode tidak langsung.

Tabel 4.10  
Laporan Arus Kas 2017

<b>BUMDES ADI KARYA MANDIRI DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2017</b>			
<b>Aktifitas Operasional</b>			
Penjualan		Rp 208.695.000	
Pembelian Bahan Baku	Rp (9.136.500)		
Tenaga Kerja Langsung	Rp (53.391.000)		
Overhead pabrik	Rp (33.956.500)		
Total Biaya	Rp (98.733.500)	<u>(Rp 195.217.500)</u>	
Laba Bersih			Rp 13.477.500
Kenaikan Piutang			Rp (13.485.000)
Pembelian Perlengkapan			Rp (901.500)
Akumulasi Penyusutan Peralatan			Rp 3.883.000
Penurunan Perlengkapan			<u>Rp 500.000</u>
<b>Arus Kas untuk Aktifitas Operasi</b>			Rp 3.474.000
<b>Aktifitas Investasi</b>			
Pembelian Peralatan		Rp (9.428.000)	
<b>Kas untuk Aktifitas Investasi</b>			Rp (9.428.000)
<b>Aktifitas Pendanaan</b>			
Penambahan Modal	Rp 129.861.500		
<b>Kas untuk Aktifitas Pendanaan</b>			<u>Rp 129.861.500</u>
Kenaikan Bersih Kas			Rp 123.907.500
Kas pada awal periode			<u>Rp -</u>
Kas pada akhir periode			Rp 123.907.500

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

## e. Catatan atas Laporan Keuangan 2017

BUMDes Adi Karya Mandiri belum membuat catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangannya. Sehingga penulis merekomendasikan catatan atas laporan keuangan sebagai berikut :

Tabel 4.11  
Catatan atas Laporan Keuangan 2017

<b>BUMDES ADI KARYA MANDIRI</b> <b>DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG</b> <b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> <b>TAHUN 2017</b>	
1. UMUM	<p>a. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BUMdes Adi Karya Mandiri Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor di bentuk melalui forum Musyawarah Desa Sumur Batu pada tanggal 12 Desember 2014 yang bergerak di bidang manufaktur. BUMDes Adi Karya Mandiri menjadikan pengelolaan Pabrikasi Tong Sampah menjadi salah satu usaha unit usaha.</p>
2. Kebijakan Akuntansi	<p>a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP dan disusun menggunakan accrual basis kecuali pada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung yang berfokus pada laba atau rugi bersih dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikeluarkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp).</p> <p>a. Kas dan Kas Bendaharawan Kas terdiri dari Kas dan Kas Bendaharawan dimana kas berasal dari bendahara desa yang di atur oleh pemerintahan desa dalam penggunaannya untuk memenuhi biaya operasional sehari-hari, seperti pembelian perlengkapan, peralatan dan beban operasional lainnya. Sedangkan kas adalah hasil dari penjualan produk yang diperoleh dalam periode berjalan. Pada akhir tahun 2018 Kas Bendaharawan dihilangkan, karena di tahun 2019 pengeluaran dan penerimaan dari akun kas saja.</p> <p>b. Piutang Usaha Piutang BUMDes “Adi Karya Mandiri” ini sendiri dari penjualan produk-produk tong sampah yang di jual secara kredit. Entitas pada dasarnya mengadakan penyisihan untuk kemungkinan adanya piutang yang tidak dapat tertagih berdasarkan prosentase atas saldo piutang pada tanggal laporan posisi keuangan.</p> <p>c. Aset Tetap SAK ETAP menjelaskan bahwa beban perolehan aset tetap harus setara harga tunainya pada tanggal pengakuan dan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap. Nilai aset tetap diakui sebesar harga perolehan yang dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak bisa disusutkan. Harga perolehan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap. Akumulasi dihitung berdasarkan masa manfaat dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.</p> <p>d. Pendapatan dan Biaya Pendapatan diakui sebagai pendapatan pada saat dilakukan penyerahan atau pengiriman barang kepada konsumen, sedangkan biaya diakui sesuai dengan masa manfaatnya (<i>accrual basic</i>) pada periode yang bersangkutan.</p> <p>e. Ekuitas Ekuitas merupakan modal yang digunakan oleh pemilik untuk membangun entitas. Pembangunan BUMDes “Adi Karya Mandiri” berdasarkan modal yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat desa.</p>

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

#### 4.3.9.3 Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018

Pada tahun 2018 BUMDes Adi Karya Mandiri belum membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP, maka dengan ini penulis merekomendasikan laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri yang sesuai dengan SAK ETAP.

## a. Laporan Posisi Keuangan 2018

Tabel 4.12  
Laporan Posisi Keuangan 2018

**Bumdes Adi Karya Mandiri**  
**Desa Sumur Batu Babakan Madang**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**Tahun 2018**

ASET		HUTANG	
Aset Lancar		Hutang	Rp -
Kas	Rp 143.744.000		
Kas Bendahawan	Rp -		
Piutang	Rp 10.515.000		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>Rp 154.259.000</b>		<b>Rp -</b>
Aset Tetap			
Perlengkapan	Rp 201.500	<b>MODAL</b>	
Peralatan	Rp 11.528.000	Modal Akhir	Rp 160.105.500
Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp (5.883.000)		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>Rp 5.846.500</b>	<b>Jumlah Modal</b>	<b>Rp 160.105.500</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Rp 160.105.500</b>	<b>Jumlah Hutang + Modal</b>	<b>Rp 160.105.500</b>

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

## b. Laporan Laba Rugi 2018

Tabel 4.13  
Laporan Laba Rugi 2018

**BUMDES ADI KARYA MANDIRI**  
**DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**TAHUN 2018**

PENJUALAN		Rp 39.480.000
HPP :		
Bahan Baku Langsung	Rp 41.890.000	
Tenaga Kerja Langsung	Rp 1.656.000	
OVERHEAD PABRIK :		
Bahan Pembantu	Rp 5.121.000	
Biaya Listrik	Rp 1.920.000	
Biaya Sewa Bangunan	Rp 6.000.000	
Biaya Penyusutan Peralatan	Rp 2.000.000	
Biaya Perlengkapan	Rp 200.000	
<b>TOTAL HARGA POKOK PRODUKSI</b>		<b>Rp (58.787.000)</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>Rp (19.307.000)</b>
Biaya-Biaya :		
Biaya Seragam	Rp 2.750.000	

Biaya Reparasi	Rp	560.000	
Biaya Administrasi	Rp	2.420.000	
<b>JUMLAH BIAYA-BIAYA</b>			Rp (5.730.000)
<b>LABA/(RUGI)</b>			<b>Rp (25.037.000)</b>

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

Tabel 4.14  
Laporan Hasil Sisa Usaha 2018

**BUMDES ADI KARYA MANDIRI  
DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG  
LAPORAN SISA HASIL USAHA  
TAHUN 2018**

Desa	30%	Rp (7.511.100)
BUMDes	40%	Rp (10.014.800)
Kegiatan Masyarakat	10%	Rp (2.503.700)
Karyawan	20%	Rp (5.007.400)
<b>Total</b>		<b>Rp (25.037.000)</b>

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

c. Laporan Perubahan Ekuitas 2018

Tabel 4.15  
Laporan Perubahan Ekuitas 2018

**BUMDES ADI KARYA MANDIRI  
DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG  
LAPORAN PERUBAHAN MODAL  
TAHUN 2018**

Modal Awal Per Januari 2018		Rp	129.861.500
Penambahan Modal	Rp	49.890.000	
Laba Ditahan	Rp	5.391.000	
Laba Bersih	Rp	(25.037.000)	
<b>Modal Akhir Desember 2017</b>		<b>Rp</b>	<b>160.105.500</b>

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

## d. Laporan Arus Kas 2018

Tabel 4.16  
Laporan Arus Kas 2018

<b>BUMDES ADI KARYA MANDIRI DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2018</b>			
<b>Aktifitas Operasional</b>			
Penjualan			Rp 39.480.000
Pembelian Bahan Baku	Rp (41.890.000)		
Tenaga Kerja Langsung	Rp (1.656.000)		
Overhead pabrik	Rp (15.241.000)		
Total Biaya	Rp (5.730.000)	<u>Rp (64.517.000)</u>	
Laba Bersih			Rp (25.037.000)
Kenaikan Piutang Dagang			Rp (13.030.000)
Penurunan Piutang Dagang			Rp 16.000.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan			Rp 2.000.000
Penurunan Perlengkapan			<u>Rp 200.000</u>
<b>Arus Kas untuk Aktifitas Operasi</b>			Rp (19.867.000)
<b>Aktifitas Investasi</b>			
Pembelian Peralatan		Rp (2.100.000)	
<b>Kas untuk Aktifitas Investasi</b>			Rp (2.100.000)
<b>Aktifitas Pendanaan</b>			
Penambahan Modal	Rp 49.890.000		
<b>Kas untuk Aktifitas Pendanaan</b>			<u>Rp 49.890.000</u>
Kenaikan Bersih Kas			Rp 27.923.000
Kas pada awal periode			Rp 115.821.000
Kas pada akhir periode			<u>Rp 143.744.000</u>

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

## e. Catatan atas Laporan Keuangan 2018

Tabel 4.17  
Catatan atas Laporan Keuangan 2018

<b>BUMDES ADI KARYA MANDIRI DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018</b>	
1.	UMUM
a.	Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
	Bumdes Adi Karya Mandiri Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor di bentuk melalui forum Musyawarah Desa Sumur Batu pada tanggal 12 Desember 2014 yang bergerak di bidang manufaktur. BUMDes Adi Karya Mandiri menjadikan pengelolaan Pabrikasi Tong Sampah menjadi salah satu usaha unit usaha.



## 2. Kebijakan Akuntansi

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP dan disusun menggunakan accrual basis kecuali pada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung yang berfokus pada laba atau rugi bersih dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikeluarkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp).

### f. Kas dan Kas Bendaharawan

Kas terdiri dari Kas dan Kas Bendaharawan dimana kas berasal dari bendahara desa yang di atur oleh pemerintahan desa dalam penggunaannya untuk memenuhi biaya operasional sehari-hari, seperti pembelian perlengkapan, peralatan dan beban operasional lainnya. Sedangkan kas adalah hasil dari penjualan produk yang diperoleh dalam periode berjalan. Pada akhir tahun 2018 Kas Bendaharawan dihilangkan, karena di tahun 2019 pengeluaran dan penerimaan akan akun kas saja.

### g. Piutang Usaha

Piutang BUMDes “Adi Karya Mandiri” ini sendiri dari penjualan produk-produk tong sampah yang di jual secara kredit. Entitas pada dasarnya mengadakan penyisihan untuk kemungkinan adanya piutang yang tidak dapat tertagih berdasarkan prosentase atas saldo piutang pada tanggal laporan posisi keuangan.

### h. Aset Tetap

SAK ETAP menjelaskan bahwa beban perolehan aset tetap harus setara harga tunainya pada tanggal pengakuan dan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap. Nilai aset tetap diakui sebesar harga perolehan yang dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak bisa disusutkan. Harga perolehan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap. Akumulasi dihitung berdasarkan masa manfaat dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

### i. Pendapatan dan Biaya

Pendapatan diakui sebagai pendapatan pada saat dilakukan penyerahan atau pengiriman barang kepada konsumen, sedangkan biaya diakui sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basic*) pada periode yang bersangkutan.

### j. Ekuitas

Ekuitas merupakan modal yang digunakan oleh pemilik untuk membangun entitas. Pembangunan BUMDes “Adi Karya Mandiri” berdasarkan modal yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

### 4.3.9.4 Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019

Pada tahun 2019 BUMDes Adi Karya Mandiri belum membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP, maka dengan ini penulis merekomendasikan laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri yang sesuai dengan SAK ETAP.

#### a. Laporan Posisi Keuangan 2019

Tabel 4.18  
Laporan Posisi Keuangan 2019

**BUMDES ADI KARYA MANDIRI  
DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
TAHUN 2019**

ASET		HUTANG	
Aset Lancar		HUTANG	19.000.000
Kas	Rp 146.008.800		
Piutang	Rp 61.165.000		

Jumlah Aset Lancar	Rp 207.173.800	Jumlah Hutang	Rp 19.000.000
Aset Tetap			
Perlengkapan	Rp 140.000	<b>MODAL</b>	
Peralatan	Rp 14.001.000	Modal Akhir	Rp 194.431.800
Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp (7.883.000)		
Jumlah Aset Tetap	Rp 6.258.000	Jumlah Modal	Rp 194.431.800
Jumlah Aset	Rp 213.431.800	Jumlah Hutang + Modal	Rp 213.431.800

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

b. Laporan Laba Rugi

Tabel 4.19  
Laporan Laba Rugi 2019

**BUMDES ADI KARYA MANDIRI**  
**DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**TAHUN 2019**

PENJUALAN		Rp 103.650.000
HPP :		
Bahan Baku Langsung	Rp 42.463.500	
Tenaga Kerja Langsung	Rp 15.062.000	
OVERHEAD PABRIK :		
Bahan Pembantu	Rp 10.751.500	
Biaya Listrik	Rp 1.920.000	
Biaya Sewa Bangunan	Rp 6.000.000	
Biaya Penyusutan Peralatan	Rp 2.000.000	
Biaya Perlengkapan	Rp 201.500	
TOTAL HARGA POKOK PRODUKSI		Rp (78.398.500)
Pendapatan Lain-Lain		Rp 27.100.000
LABA KOTOR		Rp 52.351.500
Biaya-Biaya :		
Biaya Seragam	Rp 1.000.000	
Biaya Administrasi	Rp 1.700.000	
Biaya BBM	Rp 215.000	
Biaya Transportasi	Rp 88.000	
JUMLAH BIAYA-BIAYA		Rp 3.003.000
LABA/(RUGI)		Rp 49.348.500

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

Tabel 4.20  
Laporan Hasil Sisa Usaha 2019

**BUMDES ADI KARYA MANDIRI  
DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG  
LAPORAN SISA HASIL USAHA  
TAHUN 2019**

Desa	30%	Rp	14.804.550
BUMDes	40%	Rp	19.739.400
Kegiatan Masyarakat	10%	Rp	4.934.850
Karyawan	20%	Rp	9.869.700
<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>49.348.500</b>

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 4.21  
Laporan Perubahan Ekuitas 2019

**BUMDES ADI KARYA MANDIRI  
DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG  
LAPORAN PERUBAHAN MODAL  
TAHUN 2019**

Modal Awal Per Januari 2019		Rp	145.083.300
Penambahan Modal	Rp	-	
Laba Ditahan	Rp	-	
Laba Bersih	Rp	49.348.500	
<b>Modal Akhir Desember 2019</b>		<b>Rp</b>	<b>194.431.800</b>

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

d. Laporan Arus Kas

Tabel 4.22  
Laporan Arus Kas 2019

<b>BUMDES ADI KARYA MANDIRI DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2019</b>			
<b>Aktifitas Operasional</b>			
Penjualan		Rp	103.650.000
Pendapatan Lain-Lain		Rp	27.100.000
Pembelian Bahan Baku	Rp (42.463.500)		

Tenaga Kerja Langsung	Rp (15.062.000)		
Overhead pabrik	Rp (20.873.000)		
Total Biaya-Biaya	Rp (3.003.000)	<u>Rp (81.401.500)</u>	
Laba Bersih			Rp 49.348.500
Kenaikan Piutang Dagang			Rp (50.650.000)
Pembelian Perlengkapan			Rp (140.000)
Akumulasi Penyusutan Peralatan			Rp 2.000.000
Penurunan Perlengkapan			Rp 201.500
Kenaikan dalam Hutang			Rp 20.000.000
Penurunan dalam Hutang			<u>Rp (1.000.000)</u>
<b>Arus Kas untuk Aktifitas Operasi</b>			Rp 19.760.000
<b>Aktifitas Investasi</b>			
Pembelian Peralatan		Rp (2.473.000)	
<b>Kas untuk Aktifitas Investasi</b>			<u>Rp (2.473.000)</u>
<b>Aktifitas Pendanaan</b>			
Penambahan Modal		Rp -	
<b>Kas untuk Aktifitas Pendanaan</b>			<u>Rp -</u>
Kenaikan Bersih Kas			Rp 17.287.000
Kas pada awal periode			<u>Rp 128.721.800</u>
Kas pada akhir periode			Rp 146.008.800

Sumber : Diolah Oleh Penulis 2020

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 4.23  
Catatan atas Laporan Keuangan 2019

<b>BUMDES ADI KARYA MANDIRI</b> <b>DESA SUMUR BATU BABAKAN MADANG</b> <b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> <b>TAHUN 2019</b>	
1. UMUM	
a. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	
<p>Bumdes Adi Karya Mandiri Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor di bentuk melalui forum Musyawarah Desa Sumur Batu pada tanggal 12 Desember 2014 yang bergerak di bidang manufaktur. BUMDes Adi Karya Mandiri menjadikan pengelolaan Pabrikasi Tong Sampah menjadi salah satu usaha unit usaha.</p>	
1. Kebijakan Akuntansi	
a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	
<p>Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP dan disusun menggunakan accrual basis kecuali pada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung yang berfokus pada laba atau rugi bersih dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikeluarkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp).</p>	
b. Kas	
<p>Kas berasal untuk memenuhi biaya operasional sehari-hari, seperti pembelian perlengkapan, peralatan, biaya operasional lainnya dan dari hasil dari penjualan produk yang diperoleh dalam periode berjalan.</p>	
c. Piutang Usaha	
<p>Piutang BUMDes “Adi Karya Mandiri” ini sendiri dari penjualan produk-produk tong sampah yang di jual secara kredit. Entitas pada dasarnya mengadakan penyisihan untuk kemungkinan adanya piutang</p>	

yang tidak dapat tertagih berdasarkan prosentase atas saldo piutang pada tanggal laporan posisi keuangan.

d. Aset Tetap

SAK ETAP menjelaskan bahwa beban perolehan aset tetap harus setara harga tunainya pada tanggal pengakuan dan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap. Nilai aset tetap diakui sebesar harga perolehan yang dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak bisa disusutkan. Harga perolehan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap. Akumulasi dihitung berdasarkan masa manfaat dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

e. Pendapatan dan Biaya

Pendapatan diakui sebagai pendapatan pada saat dilakukan penyerahan atau pengiriman barang kepada konsumen, sedangkan biaya diakui sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basic*) pada periode yang bersangkutan.

f. Ekuitas

Ekuitas merupakan modal yang digunakan oleh pemilik untuk membangun entitas. Pembangunan BUMDes “Adi Karya Mandiri” berdasarkan modal yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Sumber : Diolah oleh Penulis 2020

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes Adi Karya Mandiri terdiri Laporan Laba Rugi. Hal ini masih belum sesuai dengan standar SAK ETAP. Didalam SAK ETAP 3.12 disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam hal ini ketua BUMDes mengakui karena keterbatasan pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan dan kurangnya pekerja yang menimbulkan *multitasking* dalam menjalankan pekerjaan.
2. Dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dengan benar.
3. Kendala-kendala dari BUMDes Adi Karya Mandiri dalam menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya adalah sebagai berikut :
  - a. Rendahnya pemahaman pemilik terhadap SAK ETAP
  - b. Belum adanya pendamping yang intensif terkait penerapan SAK ETAP
  - c. Kurangnya sosialisasi kepada BUMDes terkait Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia selaku pencetus pedoman standar ini
  - d. Terjadinya *multitasking* dalam pengerjaan tugas yang di alami oleh ketua BUMDes dalam hal administrasi dan keuangan sehingga data-data transaksi berantakan karena tidak di tata dengan rapih.
  - e. Kurangnya pengawasan dari pihak berkepentingan seperti pemerintah desa yang seharusnya mengawasi terhadap laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri karena anggaran yang di keluarkan dari anggaran desa dan harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di BUMDes.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran supaya dapat melakukan perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes Adi Karya Mandiri :

##### A. Saran Praktis

1. Dalam pembahasan sudah disediakan rekomendasi laporan keuangan yang sesuai dengan penerapan SAK ETAP, sehingga rekomendasi bisa diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan selanjutnya
2. Merekrut karyawan baru untuk bagian administrasi dan keuangan agar dapat tertata dengan rapih dan keuangan BUMDes dapat terkontrol dengan baik.
3. Adanya sosialisasi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku pencetus pedoman SAK ETAP.

4. Adanya pendampingan dari pihak berwenang seperti pemerintah, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun dari pihak Universitas-Universitas di Indonesia khususnya dalam prodi akuntansi yang mengabdikan intensif dan memberikan bimbingan mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.
  5. Adanya pengawas dari pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan hasil usaha BUMDes selama periode berjalan.
  6. BUMDes Adi Karya Mandiri harus menjalankan kewajiban perpajakannya karena sudah menjadi wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- B. Saran Akademis
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan objek berbeda dari penelitian selanjutnya sehingga dapat merekomendasikan laporan keuangan SAK ETAP pada BUMDes yang lain
  2. Keterbatasan penelitian ini yaitu kekurangan data-data yang akurat dalam bukti-bukti transaksi, karena pihak BUMDes dalam bagian administrasi dan keuangannya tidak tertata. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat mengurangi kekurangan dan kelemahan peneliti ini sehingga peneliti selanjutnya diharapkan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Lilya, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Ni Kadek Sinarwati. (2014). *Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon) Jurusan Akuntansi Program SI*. [online] Vol: 2(1). Universitas Pendidikan Ganesha. Tersedia di: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2254> [Diakses pada 12 Desember 2019].
- Apryanto, Juhanda. Khairani, Siti. dan Pratiwi, Raisa. (2015). *Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Kasus Pada Pengusaha Budidaya Lele Mariani) Juhanda*. [online]. Tersedia di: <http://eprints.mdp.ac.id/1785/> [Diakses pada 12 Desember 2019]
- Fadlol, M. Ainul, Titin Kartini, dan Sri Kantun. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Oryza Mart Jember*. Universitas Jember. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial, [online] Voume 12(2): 270–76. Tersedia di: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/8570> [Diakses pada 20 November 2019]
- Harahap, Sofyan Syafri. (2015). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Integrated And Comprehensive*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Penerbit Ikatan Akuntansi Indonesia.
- \_\_\_\_\_. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Penerbit Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Jayanti, Dwi, dan Nurul, Qomari. (2018). *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa ( Bumdesa ) ‘ Surya Sejahtera ’ Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. [online] Volume 4 Issue 3. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya. Tersedia di: <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/782> [Diakses pada 3 Oktober 2019]
- Kalangi, Lintje, Jullie Sondakh, And Ade Pratiwi. (2014). *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nichindo Manado Suisan*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, [online] Volume 2(3): 254–



65. Universitas Sam Ratulangi Manado. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5498> [Diakses pada 20 November 2019]
- Kurniawanysah, Deddy. (2016). *Penerapan Pencatatan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi*. Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal ISBN: 832-41, [online] Universitas Jember. Tersedia di: <https://adoc.tips/penerapan-pencatatan-akuntansi-dan-penyusunan-laporan-keuang.html> [Diakses pada 17 Desember 2019]
- Lubis, Rahmat Hidayat. (2017). *Pengantar Akuntansi Jasa*. Yogyakarta: Gava Media
- Nasution, Adam Saleh. (2019). *Perkuat Ekonomi Desa. Bupati Bogor Minta Kades Bentuk Bumdes*. [kanaljabar.com](http://kanaljabar.com). Tersedia di: <http://kanaljabar.com/perkuat-ekonomi-desa-bupati-bogor-minta-kades-bentuk-bumdes/> [Diakses pada 31 Juli 2019]
- Norkamsiah, Kesuma, Setiawaty. (2016). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan*. [online] Volume 13(2): 151-63. Universitas Mulawarman. Tersedia di: <http://journal.feb.unmul.ac.id> [Diakses pada 17 Desember 2019]
- Peraturan Menteri Desa. *Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015*
- Ponomban, Yohanes. C. Saerang, David P.E. Wangkar, Anneke. (2016). *Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada CV. Bahu Bahtera Indah Manado. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*. [online] Volume 4(3): 622-30. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14296> [Diakses pada 17 Desember 2019]
- Rahmaniar, Ani., dan Soegijanto. (2016). *Pengantar Akuntansi Dasar 1 Siklus Akuntansi (Accounting Cycle) Untuk Perusahaan Jasa*. Bogor: Penerbit In Media.
- Rudini, Nurhayati, And Afriyanto. (2016). *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Langkitin Di Desa Langkitin*. [online] Volume 2(1): 1-6. Tersedia di: <http://e-journal.upp.ac.id/index.php/akfekon/article/view/689> [Diakses pada 3 Oktober 2019]
- Resti, Ayu. (2019). *Standar Akuntansi yang Diterapkan BUMDes*. Blog.bumdes. Tersedia di: <http://blog.bumdes.id/2019/04/standar-akuntansi-yang-diterapkan->

bumdes/ [Di Akses pada 17 Desember 2019]

- Sakti. (2017). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Pada Tria's Cake & Bakery Di Blitar*. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, [online] 53(9): 1689–99. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Tersedia di: <http://etheses.uin-malang.ac.id/5990/> [Diakses pada 14 November 2019]
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 (2014). *Tentang Desa*
- Wahyuni, Ersa Tri. (2018). *Membangun Desa, Membangun Indonesia : Peran Akuntan Dalam Memperkuat Bumdes*. etw-accountant.com. Tersedia di: <http://etw-accountant.com/tag/bumdes/> [Diakses pada 30 Agustus 2019]
- Widyastuti, Pristiana. (2017). *Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) di Bidang Jasa*. [online] Vol. 1 No. 1 : 50–63. Universitas 17 Agustus 1945. Tersedia di: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JBE/article/view/719> [Diakses pada 17 Desember 2019]
- Yuliza, Arma. Afrijal. (2016). *Analisis Penerapan SAK-ETAP Pada Koperasi di Universitas Pasir Pengaraian*. [online] Vol. 5 No. 2 : 97–102. Universitas Pasir Pengaraian. Tersedia di: <http://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1227> [Diakses pada 17 Desember 2019]

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dias Nursifa

Alamat : Kp. Babakan Rawa Haur RT 01/RW 06 Desa Sentul,  
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor/16810

Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 14 Maret 1998

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Sentul 03
- SMP : SMPN 2 Sukaraja
- SMA : SMK PGRI 3 Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Agustus 2020  
Peneliti,

(Dias Nursifa)



**BUKU BESAR  
20XX**

NO AKUN : 11110		Nama Akun : Kas	
Tanggal	Akun	Debet	Kredit
	Kas		
	Kas		
	Kas		
	Kas		
Total			

NO AKUN : 11111		Nama Akun : Kas Bendaharawan	
Tanggal	Akun	Debet	Kredit
	Kas Bendaharawan		
	Kas Bendaharawan		
	Kas Bendaharawan		
	Kas Bendaharawan		
Total			

NO AKUN : 11210		Nama Akun : Piutang	
Tanggal	Akun	Debet	Kredit
	Piutang		
	Piutang		
	Piutang		
	Piutang		
Total			

NO AKUN : 11300		Nama Akun : Persediaan Bahan Baku	
Tanggal	Akun	Debet	Kredit
	Persediaan Bahan Baku		
	Persediaan Bahan Baku		
	Persediaan Bahan Baku		
	Persediaan Bahan Baku		
Total			

NO AKUN : 11310		Nama Akun : Persediaan Bahan Pembantu	
Tanggal	Akun	Debet	Kredit
	Persediaan Bahan Pembantu		
	Persediaan Bahan Pembantu		
	Persediaan Bahan Pembantu		
	Persediaan Bahan Pembantu		
Total			

NO AKUN : 11500		Nama Akun : Perlengkapan	
Tanggal	Akun	Debet	Kredit
	Perlengkapan		
	Perlengkapan		
	Perlengkapan		
	Perlengkapan		
Total			

NO AKUN : 13100		Nama Akun : Peralatan	
Tanggal	Akun	Debet	Kredit
	Peralatan		
	Peralatan		
	Peralatan		
	Peralatan		
Total			

NO AKUN : 21100		Nama Akun : Hutang	
Tanggal	Akun	Debet	Kredit
	Hutang		
	Hutang		
	Hutang		
	Hutang		
Total			

NO AKUN : 23310		Nama Akun : Modal	
Tanggal	Akun	Debet	Kredit
	Modal		
	Modal		
	Modal		
	Modal		
Total			

NO AKUN : 31240		Nama Akun : Penjualan	
Tanggal	Akun	Debet	Kredit
	Penjualan		
	Penjualan		
	Penjualan		
	Penjualan		
Total			

NO AKUN : 41170		Nama Akun : Biaya	
Tanggal	Akun	Debet	Kredit
	Biaya		
	Biaya		
	Biaya		
Total			

**NERACA SALDO**  
**Tahun 20XX**

<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas	11110		
Kas Bendahawan	11111		
Piutang	11210		
Persediaan Bahan Baku	11300		
Persediaan Bahan Pembantu	11310		
Perlengkapan	11500		
Peralatan	13100		
Hutang	21100		
Modal	23310		
Penjualan	31240		
Biaya Iklan	41170		
Biaya Angkut	41171		
Biaya Karyawan Produksi	41172		
Biaya Keamanan	41173		
Biaya Listrik	41174		
Biaya Seragam	41175		
Biaya Sewa Bangunan	41176		
Biaya Reparasi	41177		
Biaya Administrasi	41178		
Total			





### Lampiran III

#### Hasil Wawancara

Wawancara kepada ketua BUMDes Adi Karya Mandiri Bapak Budi.

1. Sudah berapa lama BUMDes Adi Karya di buat?  
Jawaban : “BUMDes Adi Karya Mandiri ini sudah ada sejak tahun 2016”
2. Bagaimana sistem pencatatan laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri dari awal pendirian?  
Jawaban : “Pada tahun 2016 belum ada transaksi karena BUMDes Adi Karya Mandiri baru berdiri mba, untuk tahun selanjutnya saya awalnya mencatat pengeluaran namun tidak saya lanjutkan karena tidak terpegang kerjanya, sehingga hanya mengumpulkan bon-bon pengeluaran dan faktur penjualan saja”.
3. Apakah di BUMDes Adi Karya Mandiri terdapat struktur organisasi dan tugas kerja?  
Jawaban: “Pada awal sudah dibuat struktur organisasinya, namun saat berjalannya waktu tugas-tugas tidak dilaksanakan dan semuanya saya yang kerjakan sendiri.”
4. Asal modal BUMDes Adi Karya Mandiri itu dari mana?  
Jawaban : “Untuk modal BUMDes itu di peroleh dari pemerintah desa.”
5. Bagaimana BUMDes Adi Karya Mandiri menyusun laporan keuangannya?  
Jawaban : Saya kurang paham mengenai cara membuat laporan keuangan yang semestinya seperti apa mba, jadi selama ini saya hanya menyetorkan hasil laba BUMDes ke desa dengan perhitungan saya dari uang yang masuk dan uang yang keluar di BUMDes”.
6. Bagaimana BUMDes Adi Karya Mandiri mengakui pendapatan?  
Jawaban : “Yang saya ketahui kas itu dari uang masuk dikurangi uang yang keluar, sehingga sisanya itu menjadi pendapatan”.
7. Bagaimana BUMDes Adi Karya Mandiri mengakui Biaya?  
Jawaban : “Saya sih ngitungnya saat uang keluar itu dianggap biaya dan yang nantinya akan mengurangi pemasukan BUMDes.
8. Berapakah modal awal BUMDes Adi Karya Mandiri?  
Jawaban : “ Modal awalnya sekitar 100 jutaan, bukti penerimaannya ada di bon-bon yang saya simpan”.
9. Bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan di BUMDes Adi Karya Mandiri ?  
Jawaban : “Pengambilan keputusan BUMDes berdasarkan kebijakan saya sendiri. Kebijakan yang diambil tergantung situasi dan kondisi BUMDes yang sedang BUMDes alami, karena jika mau mengambil keputusan dari laporan keuangan saya belum buat sama sekali dan kurang paham juga”.
10. Kepada siapakah laporan keuangan di pertanggungjawabkan?  
Jawaban : “Karena dari awal tidak membuat laporan keuangan, maka kita hanya melaporkan hasil laba dari perhitungan saya sendiri ke desa”.